



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
KLASIFIKASI ARSIP
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KABINET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, klasifikasi arsip di masing-masing Kementerian/Lembaga ditetapkan oleh pimpinan pencipta arsip;
- b. bahwa dalam rangka menyesuaikan perubahan tugas dan fungsi organisasi, dan menciptakan pengelolaan arsip dinamis yang efektif, efisien, dan terpadu di lingkungan Sekretariat Kabinet, diperlukan penyempurnaan sistem penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan perkembangan kebijakan pengelolaan arsip nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Kabinet tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Sekretariat Kabinet Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
3. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 95);
4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip;

5. Peraturan...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

5. Peraturan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS KABINET TENTANG KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KABINET.

Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Kabinet ini yang dimaksud dengan:

1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Sekretariat Kabinet dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan yang dilakukan oleh Sekretariat Kabinet yang disimpan selama jangka waktu tertentu.
3. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.
4. Klasifikasi Arsip Substantif adalah fungsi kegiatan pelaksanaan tugas pokok Sekretariat Kabinet.
5. Klasifikasi Arsip Fasilitatif adalah fungsi kegiatan pelaksanaan tugas penunjang Sekretariat Kabinet.

Pasal 2

- (1) Klasifikasi Arsip dimaksudkan sebagai dasar dan acuan dalam rangka pengelolaan dan pengaturan Arsip Dinamis di lingkungan Sekretariat Kabinet.
- (2) Penyusunan Klasifikasi Arsip ini bertujuan untuk:
 - a. menciptakan keseragaman dalam penggunaan pola Klasifikasi Arsip;

b. mewujudkan...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- b. mewujudkan tata kelola Arsip Dinamis secara terpadu sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- c. memudahkan penyimpanan dan penemuan kembali Arsip; dan
- d. menciptakan tertib administrasi pengelolaan Arsip Dinamis.

Pasal 3

- (1) Klasifikasi Arsip di lingkungan Sekretariat Kabinet menggunakan kode Klasifikasi Arsip dalam bentuk gabungan huruf dan angka.
- (2) Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanda pengenal urusan sesuai fungsi dan tugas unit kerja serta berfungsi sebagai dasar pemberkasan dan penataan arsip.

Pasal 4

- (1) Klasifikasi Arsip di lingkungan Sekretariat Kabinet terdiri dari:
 - a. Klasifikasi Arsip Substantif; dan
 - b. Klasifikasi Arsip Fasilitatif.
- (2) Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Sekretaris Kabinet ini.

Pasal 5

Dalam melakukan pengelolaan Arsip Dinamis, setiap unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet wajib berpedoman pada Klasifikasi Arsip sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Kabinet ini.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Sekretaris Kabinet ini mulai berlaku, Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 7 Tahun 2013 tentang Klasifikasi Arsip Sekretariat Kabinet Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Pasal 7

Peraturan Sekretaris Kabinet ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2022

**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

PRAMONO ANUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Administrasi,



Farid Utomo



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 7 TAHUN 2022
TANGGAL : 22 SEPTEMBER 2022

KLASIFIKASI ARSIP
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KABINET

FUNGSI SUBSTANTIF

RK. DUKUNGAN/PEMBERIAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

01 Pengkajian dan Pemberian Rekomendasi atas Rencana Kebijakan dan Program Pemerintah

01.01 Pemerintahan Dalam Negeri

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pengkajian dalam rangka pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintahan dalam negeri, antara lain: dokumen bahan kajian (berkas masuk: surat, naskah akademik/laporan *stakeholders*, arahan/disposisi), dokumen perencanaan kegiatan, dokumen hasil pengamatan/pemantauan/evaluasi/pengendalian/pengumpulan data (FGD, rakor, bahan pustaka, monitoring dan evaluasi), dokumen hasil kajian dan rekomendasi, serta dokumen publikasi (berita, artikel, hasil sosialisasi).

01.02 Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pengkajian dalam rangka pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program bidang hukum, hak asasi manusia dan aparatur negara, antara lain: dokumen bahan kajian (berkas masuk: surat, naskah akademik/laporan *stakeholders*, arahan/disposisi), dokumen perencanaan kegiatan, dokumen hasil pengamatan/pemantauan/evaluasi/pengendalian/pengumpulan data (FGD, rakor, bahan pustaka, monitoring dan evaluasi), dokumen hasil kajian dan rekomendasi, serta dokumen publikasi (berita, artikel, hasil sosialisasi).



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

01.03 Hubungan Internasional

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pengkajian dalam rangka pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program bidang hubungan internasional, antara lain: dokumen bahan kajian (berkas masuk: surat, naskah akademik/laporan *stakeholders*, arahan/disposisi), dokumen perencanaan kegiatan, dokumen hasil pengamatan/pemantauan/evaluasi/pengendalian/pengumpulan data (FGD, rakor, bahan pustaka, monitoring dan evaluasi), dokumen hasil kajian dan rekomendasi, serta dokumen publikasi (berita, artikel, hasil sosialisasi).

01.04 Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pengkajian dalam rangka pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program bidang pertahanan, keamanan, komunikasi dan informatika, antara lain: dokumen bahan kajian (berkas masuk: surat, naskah akademik/laporan *stakeholders*, arahan/disposisi), dokumen perencanaan kegiatan, dokumen hasil pengamatan/pemantauan/evaluasi/pengendalian/pengumpulan data (FGD, rakor, bahan pustaka, monitoring dan evaluasi), dokumen hasil kajian dan rekomendasi, serta dokumen publikasi (berita, artikel, hasil sosialisasi).

01.05 Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pengkajian dalam rangka pemberian rekomendasi terhadap rencana kebijakan pemerintah di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha, antara lain: dokumen bahan kajian (berkas masuk: surat, naskah akademik/laporan *stakeholders*, arahan/disposisi), dokumen perencanaan kegiatan, dokumen hasil pengamatan/pemantauan/evaluasi/pengendalian/pengumpulan data (FGD, rakor, bahan pustaka, monitoring dan evaluasi), dokumen hasil kajian dan rekomendasi, serta dokumen publikasi (berita, artikel, hasil sosialisasi).

01.06 Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pengkajian dalam rangka pemberian rekomendasi terhadap rencana



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

kebijakan pemerintah di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan, antara lain: dokumen bahan kajian (berkas masuk: surat, naskah akademik/laporan *stakeholders*, arahan/disposisi), dokumen perencanaan kegiatan, dokumen hasil pengamatan/pemantauan/evaluasi/pengendalian/pengumpulan data (FGD, rakor, bahan pustaka, monitoring dan evaluasi), dokumen hasil kajian dan rekomendasi, serta dokumen publikasi (berita, artikel, hasil sosialisasi).

01.07 Pengembangan Usaha dan Wilayah

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pengkajian dalam rangka pemberian rekomendasi terhadap rencana kebijakan pemerintah di bidang pengembangan usaha dan wilayah, antara lain: dokumen bahan kajian (berkas masuk: surat, naskah akademik/laporan *stakeholders*, arahan/disposisi), dokumen perencanaan kegiatan, dokumen hasil pengamatan/ pemantauan/evaluasi/pengendalian/pengumpulan data (FGD, rakor, bahan pustaka, monitoring dan evaluasi), dokumen hasil kajian dan rekomendasi, serta dokumen publikasi (berita, artikel, hasil sosialisasi).

01.08 Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pengkajian dalam rangka pemberian rekomendasi terhadap rencana kebijakan pemerintah di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan Inovasi, antara lain: dokumen bahan kajian (berkas masuk: surat, naskah akademik/laporan *stakeholders*, arahan/disposisi), dokumen perencanaan kegiatan, dokumen hasil pengamatan/ pemantauan/evaluasi/pengendalian/pengumpulan data (FGD, rakor, bahan pustaka, monitoring dan evaluasi), dokumen hasil kajian dan rekomendasi, serta dokumen publikasi (berita, artikel, hasil sosialisasi).

01.09 Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pengkajian dalam rangka pemberian rekomendasi terhadap rencana kebijakan pemerintah di bidang agama, Kesehatan, pemuda, dan olahraga antara lain: dokumen bahan kajian (berkas masuk: surat, naskah akademik/laporan *stakeholders*, arahan/disposisi), dokumen perencanaan kegiatan, dokumen hasil pengamatan/ pemantauan/evaluasi/pengendalian/pengumpulan data (FGD, rakor, bahan pustaka, monitoring dan evaluasi), dokumen hasil kajian dan rekomendasi, serta dokumen publikasi (berita, artikel, hasil sosialisasi).



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

01.10 Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pengkajian dalam rangka pemberian rekomendasi terhadap rencana kebijakan pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, antara lain: dokumen bahan kajian (berkas masuk: surat, naskah akademik/laporan *stakeholders*, arahan/disposisi), dokumen perencanaan kegiatan, dokumen hasil pengamatan/pemantauan/evaluasi/pengendalian/pengumpulan data (FGD, rakor, bahan pustaka, monitoring dan evaluasi), dokumen hasil kajian dan rekomendasi, serta dokumen publikasi (berita, artikel, hasil sosialisasi).

01.11 Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pengkajian dalam rangka pemberian rekomendasi terhadap rencana kebijakan pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, antara lain: dokumen bahan kajian (berkas masuk: surat, naskah akademik/laporan *stakeholders*, arahan/disposisi), dokumen perencanaan kegiatan, dokumen hasil pengamatan/pemantauan/evaluasi/pengendalian/pengumpulan data (FGD, rakor, bahan pustaka, monitoring dan evaluasi), dokumen hasil kajian dan rekomendasi, serta dokumen publikasi (berita, artikel, hasil sosialisasi).

01.12 Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pengkajian dalam rangka pemberian rekomendasi terhadap rencana kebijakan pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi, antara lain: dokumen bahan kajian (berkas masuk: surat, naskah akademik/laporan *stakeholders*, arahan/disposisi), dokumen perencanaan kegiatan, dokumen hasil pengamatan/pemantauan/evaluasi/pengendalian/pengumpulan data (FGD, rakor, bahan pustaka, monitoring dan evaluasi), dokumen hasil kajian dan rekomendasi, serta dokumen publikasi (berita, artikel, hasil sosialisasi).



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

01.13 Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pengkajian dalam rangka pemberian rekomendasi terhadap rencana kebijakan pemerintah di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan, antara lain: dokumen bahan kajian (berkas masuk: surat, naskah akademik/laporan *stakeholders*, arahan/disposisi), dokumen perencanaan kegiatan, dokumen hasil pengamatan/ pemantauan/evaluasi/pengendalian/pengumpulan data (FGD, rakor, bahan pustaka, monitoring dan evaluasi), dokumen hasil kajian dan rekomendasi, serta dokumen publikasi (berita, artikel, hasil sosialisasi).

01.14 Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pengkajian dalam rangka pemberian rekomendasi terhadap rencana kebijakan pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup, antara lain: dokumen bahan kajian (berkas masuk: surat, naskah akademik/laporan *stakeholders*, arahan/disposisi), dokumen perencanaan kegiatan, dokumen hasil pengamatan/ pemantauan/evaluasi/pengendalian/pengumpulan data (FGD, rakor, bahan pustaka, monitoring dan evaluasi), dokumen hasil kajian dan rekomendasi, serta dokumen publikasi (berita, artikel, hasil sosialisasi).

01.15 Perhubungan dan Pekerjaan Umum

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pengkajian dalam rangka pemberian rekomendasi terhadap rencana kebijakan pemerintah di bidang perhubungan dan pekerjaan umum, antara lain: dokumen bahan kajian (berkas masuk: surat, naskah akademik/laporan *stakeholders*, arahan/disposisi), dokumen perencanaan kegiatan, dokumen hasil pengamatan/ pemantauan/evaluasi/pengendalian/pengumpulan data (FGD, rakor, bahan pustaka, monitoring dan evaluasi), dokumen hasil kajian dan rekomendasi, serta dokumen publikasi (berita, artikel, hasil sosialisasi).



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

01.16 Penanaman Modal dan Kepariwisata

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pengkajian dalam rangka pemberian rekomendasi terhadap rencana kebijakan pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan, antara lain: dokumen bahan kajian (berkas masuk: surat, naskah akademik/laporan *stakeholders*, arahan/disposisi), dokumen perencanaan kegiatan, dokumen hasil pengamatan/ pemantauan/evaluasi/pengendalian/pengumpulan data (FGD, rakor, bahan pustaka, monitoring dan evaluasi), dokumen hasil kajian dan rekomendasi, serta dokumen publikasi (berita, artikel, hasil sosialisasi).

02 Penyelesaian Masalah atas Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pemerintah yang Mengalami Hambatan

02.01 Pemerintahan Dalam Negeri

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian rekomendasi dalam rangka pengendalian penyelenggaraan pemerintah untuk penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pemerintahan dalam negeri, antara lain: bahan kajian (surat, naskah akademik/laporan *stakeholder*, arahan/disposisi), dokumen perencanaan kegiatan, hasil pengamatan/ pengumpulan data, hasil kajian dan rekomendasi atas penyelesaian masalah pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, serta publikasi.

02.02 Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian rekomendasi dalam rangka pengendalian penyelenggaraan pemerintah untuk penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara, antara lain: bahan kajian (surat, naskah akademik/laporan *stakeholder*, arahan/disposisi), dokumen perencanaan kegiatan, hasil pengamatan/pengumpulan data, hasil kajian dan rekomendasi atas penyelesaian masalah pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, serta publikasi.



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- 02.03 Hubungan Internasional
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian rekomendasi dalam rangka pengendalian penyelenggaraan pemerintah untuk penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang hubungan internasional, antara lain: bahan kajian (surat, naskah akademik/laporan *stakeholder*, arahan/disposisi), dokumen perencanaan kegiatan, hasil pengamatan/ pengumpulan data, hasil kajian dan rekomendasi atas penyelesaian masalah pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, serta publikasi.
- 02.04 Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian rekomendasi dalam rangka pengendalian penyelenggaraan pemerintah untuk penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika, antara lain: bahan kajian (surat, naskah akademik/laporan *stakeholder*, arahan/disposisi), dokumen perencanaan kegiatan, hasil pengamatan/pengumpulan data, hasil kajian dan rekomendasi atas penyelesaian masalah pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, serta publikasi.
- 02.05 Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian rekomendasi dalam rangka pengendalian penyelenggaraan pemerintah untuk penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha, antara lain: bahan kajian (surat, naskah akademik/laporan *stakeholder*, arahan/disposisi), dokumen perencanaan kegiatan, hasil pengamatan/pengumpulan data, hasil kajian dan rekomendasi atas penyelesaian masalah pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, serta publikasi.



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- 02.06 Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian rekomendasi dalam rangka pengendalian penyelenggaraan pemerintah untuk penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan, antara lain: bahan kajian (surat, naskah akademik/laporan *stakeholder*, arahan/disposisi), dokumen perencanaan kegiatan, hasil pengamatan/pengumpulan data, hasil kajian dan rekomendasi atas penyelesaian masalah pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, serta publikasi.
- 02.07 Pengembangan Usaha dan Wilayah
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian rekomendasi dalam rangka pengendalian penyelenggaraan pemerintah untuk penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pengembangan usaha dan wilayah, antara lain: bahan kajian (surat, naskah akademik/laporan *stakeholder*, arahan/disposisi), dokumen perencanaan kegiatan, hasil pengamatan/pengumpulan data, hasil kajian dan rekomendasi atas penyelesaian masalah pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, serta publikasi.
- 02.08 Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian rekomendasi dalam rangka pengendalian penyelenggaraan pemerintah untuk penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan inovasi, antara lain: Bahan kajian (surat, naskah akademik/laporan *stakeholder*, arahan/disposisi), dokumen perencanaan kegiatan, hasil pengamatan/pengumpulan data, hasil kajian dan rekomendasi atas penyelesaian masalah pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, serta publikasi.



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- 02.09 Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian rekomendasi dalam rangka pengendalian penyelenggaraan pemerintah untuk penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga, antara lain: bahan kajian (surat, naskah akademik/laporan *stakeholder*, arahan/disposisi), dokumen perencanaan kegiatan, hasil pengamatan/pengumpulan data, hasil kajian dan rekomendasi atas penyelesaian masalah pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, serta publikasi.
- 02.10 Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian rekomendasi dalam rangka pengendalian penyelenggaraan pemerintah untuk penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, antara lain: bahan kajian (surat, naskah akademik/laporan *stakeholder*, arahan/disposisi), dokumen perencanaan kegiatan, hasil pengamatan/ pengumpulan data, hasil kajian dan rekomendasi atas penyelesaian masalah pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, serta publikasi.
- 02.11 Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian rekomendasi dalam rangka pengendalian penyelenggaraan pemerintah untuk penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, antara lain: bahan kajian (surat, naskah akademik/laporan *stakeholder*, arahan/disposisi), dokumen perencanaan kegiatan, hasil pengamatan/ pengumpulan data, hasil kajian dan rekomendasi atas penyelesaian masalah pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, serta publikasi.



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- 02.12 Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian rekomendasi dalam rangka pengendalian penyelenggaraan pemerintah untuk penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi, antara lain: bahan kajian (surat, naskah akademik/laporan *stakeholder*, arahan/disposisi), dokumen perencanaan kegiatan, hasil pengamatan/pengumpulan data, hasil kajian dan rekomendasi atas penyelesaian masalah pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, serta publikasi.
- 02.13 Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian rekomendasi dalam rangka pengendalian penyelenggaraan pemerintah untuk penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan, antara lain: bahan kajian (surat, naskah akademik/laporan *stakeholder*, arahan/disposisi), dokumen perencanaan kegiatan, hasil pengamatan/ pengumpulan data, hasil kajian dan rekomendasi atas penyelesaian masalah pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, serta publikasi.
- 02.14 Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian rekomendasi dalam rangka pengendalian penyelenggaraan pemerintah untuk penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup, antara lain: bahan kajian (surat, naskah akademik/laporan *stakeholder*, arahan/disposisi), dokumen perencanaan kegiatan, hasil pengamatan/pengumpulan data, hasil kajian dan rekomendasi atas penyelesaian masalah pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, serta publikasi.



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

02.15 Perhubungan dan Pekerjaan Umum

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian rekomendasi dalam rangka pengendalian penyelenggaraan pemerintah untuk penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang perhubungan dan pekerjaan umum, antara lain: bahan kajian (surat, naskah akademik/laporan *stakeholder*, arahan/disposisi), dokumen perencanaan kegiatan, hasil pengamatan/pengumpulan data, hasil kajian dan rekomendasi atas penyelesaian masalah pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, serta publikasi.

02.16 Penanaman Modal dan Kepariwisata

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian rekomendasi dalam rangka pengendalian penyelenggaraan pemerintah untuk penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang penanaman modal dan kepariwisataan, antara lain: Bahan kajian (surat, naskah akademik/laporan *stakeholder*, arahan/disposisi), dokumen perencanaan kegiatan, hasil pengamatan/pengumpulan data, hasil kajian dan rekomen-dasi atas penyelesaian masalah pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, serta publikasi.

03 Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian atas Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pemerintah

03.01 Pemerintahan Dalam Negeri

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian rekomendasi berdasar hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri, antara lain: bahan kajian/pemantauan (arahan/janji Presiden, rumusan program/kegiatan K/L, laporan *stakeholder*, dan isu



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

strategis), dokumen perencanaan kegiatan, hasil pengamatan/pengumpulan data, hasil kajian dan rekomendasi atas hasil pemantauan evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, serta publikasi.

03.02 Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian rekomendasi berdasar hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara, antara lain: bahan kajian/pemantauan (arahan/janji Presiden, rumusan program/kegiatan K/L, laporan *stakeholder*, dan isu strategis), dokumen perencanaan kegiatan, hasil pengamatan/pengumpulan data, hasil kajian dan rekomendasi atas hasil pemantauan evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, serta publikasi.

03.03 Hubungan Internasional

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian rekomendasi berdasar hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional, antara lain: bahan kajian/pemantauan (arahan/janji Presiden, rumusan program/kegiatan K/L, laporan *stakeholder*, dan isu strategis), dokumen perencanaan kegiatan, hasil pengamatan/pengumpulan data, hasil kajian dan rekomendasi atas hasil pemantauan evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, serta publikasi.

03.04 Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian rekomendasi berdasar hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika, antara lain: bahan kajian/pemantauan (arahan/janji Presiden, rumusan program/kegiatan K/L, laporan *stakeholder*, dan isu strategis), dokumen perencanaan kegiatan, hasil pengamatan/pengumpulan data, hasil kajian dan rekomendasi atas hasil pemantauan evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, serta publikasi.

03.05 Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian rekomendasi berdasar hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha, antara lain: bahan kajian/pemantauan (arahan/janji Presiden, rumusan program/kegiatan K/L, laporan *stakeholder*, dan isu strategis), dokumen perencanaan kegiatan, hasil pengamatan/pengumpulan data, hasil kajian dan rekomendasi atas hasil pemantauan evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, serta publikasi.

03.06 Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian rekomendasi berdasar hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan, antara lain: bahan kajian/pemantauan (arahan/janji Presiden, rumusan program/kegiatan K/L, laporan *stakeholder*, dan isu strategis), dokumen perencanaan kegiatan, hasil pengamatan/pengumpulan data, hasil kajian dan rekomendasi atas hasil pemantauan evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, serta publikasi.



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- 03.07 Pengembangan Usaha dan Wilayah
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian rekomendasi berdasar hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pengembangan usaha dan wilayah, antara lain: bahan kajian/pemantauan (arahan/janji Presiden, rumusan program/kegiatan K/L, laporan *stakeholder*, dan isu strategis), dokumen perencanaan kegiatan, hasil pengamatan/pengumpulan data, hasil kajian dan rekomendasi atas hasil pemantauan evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, serta publikasi.
- 03.08 Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian rekomendasi berdasar hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan inovasi, antara lain: bahan kajian/pemantauan (arahan/janji Presiden, rumusan program/kegiatan K/L, laporan *stakeholder*, dan isu strategis), dokumen perencanaan kegiatan, hasil pengamatan/pengumpulan data, hasil kajian dan rekomendasi atas hasil pemantauan evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, serta publikasi.
- 03.09 Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian rekomendasi berdasar hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga, antara lain: bahan kajian/pemantauan (arahan/janji Presiden, rumusan program/kegiatan K/L, laporan *stakeholder*, dan isu strategis), dokumen perencanaan kegiatan, hasil pengamatan/



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

pengumpulan data, hasil kajian dan rekomendasi atas hasil pemantauan evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, serta publikasi.

03.10 Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian rekomendasi berdasar hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, antara lain: bahan kajian/ pemantauan (arahan/janji Presiden, rumusan program/ kegiatan K/L, laporan *stakeholder*, dan isu strategis), dokumen perencanaan kegiatan, hasil pengamatan/ pengumpulan data, hasil kajian dan rekomendasi atas hasil pemantauan evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, serta publikasi.

03.11 Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian rekomendasi berdasar hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, antara lain: bahan kajian/pemantauan (arahan/janji Presiden, rumusan program/kegiatan K/L, laporan *stakeholder*, dan isu strategis), dokumen perencanaan kegiatan, hasil pengamatan/pengumpulan data, hasil kajian dan rekomendasi atas hasil pemantauan evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, serta publikasi.

03.12 Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian rekomendasi berdasar hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi,



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

antara lain: bahan kajian/pemantauan (arahan/janji Presiden, rumusan program/kegiatan K/L, laporan *stakeholder*, dan isu strategis), dokumen perencanaan kegiatan, hasil pengamatan/pengumpulan data, hasil kajian dan rekomendasi atas hasil pemantauan evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, serta publikasi.

03.13 Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian rekomendasi berdasar hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan, antara lain: bahan kajian/pemantauan (arahan/janji Presiden, rumusan program/kegiatan K/L, laporan *stakeholder*, dan isu strategis), dokumen perencanaan kegiatan, hasil pengamatan/pengumpulan data, hasil kajian dan rekomendasi atas hasil pemantauan evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, serta publikasi.

03.14 Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian rekomendasi berdasar hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup, antara lain: bahan kajian/pemantauan (arahan/janji Presiden, rumusan program/kegiatan K/L, laporan *stakeholder*, dan isu strategis), dokumen perencanaan kegiatan, hasil pengamatan/pengumpulan data, hasil kajian dan rekomendasi atas hasil pemantauan evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, serta publikasi.

03.15 Perhubungan dan Pekerjaan Umum

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian rekomendasi berdasar hasil pemantauan, evaluasi, dan



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

pengendalian dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perhubungan dan pekerjaan umum, antara lain: bahan kajian/pemantauan (arahan/janji Presiden, rumusan program/kegiatan K/L, laporan *stakeholder*, dan isu strategis), dokumen perencanaan kegiatan, hasil pengamatan/pengumpulan data, hasil kajian dan rekomendasi atas hasil pemantauan evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, serta publikasi.

03.16 Penanaman Modal dan Kepariwisata

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian rekomendasi berdasar hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan, antara lain: bahan kajian/pemantauan (arahan/janji Presiden, rumusan program/kegiatan K/L, laporan *stakeholder*, dan isu strategis), dokumen perencanaan kegiatan, hasil pengamatan/pengumpulan data, hasil kajian dan rekomendasi atas hasil pemantauan evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, serta publikasi.

04 Pengkajian dan Pemberian Rekomendasi Atas Rencana Kebijakan Kementerian/Lembaga dalam Bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang Perlu Mendapatkan Persetujuan Presiden

04.01 Pemerintahan Dalam Negeri

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pemerintahan dalam negeri, antara lain: bahan kajian dan pemberian rekomendasi atas Rancangan Peraturan Menteri (R-Permen)/Rancangan Peraturan Kepala (R-Perka) yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden (surat permohonan, naskah urgensi, dan R-Permen/R-Perka;



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

arahan/disposisi Pimpinan), dokumen pembahasan/harmonisasi, hasil rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, dan rekapitulasi rekomendasi R-Permen/R-Perka.

04.02 Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara, antara lain: bahan kajian dan pemberian rekomendasi atas R-Permen/R-Perka yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden (surat permohonan, naskah urgensi, dan R-Permen/R-Perka; arahan/disposisi Pimpinan), dokumen pembahasan/harmonisasi, hasil rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, dan rekapitulasi rekomendasi R-Permen/R-Perka.

04.03 Hubungan Internasional

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang hubungan internasional, antara lain: bahan kajian dan pemberian rekomendasi atas R-Permen/R-Perka yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden (surat permohonan, naskah urgensi, dan R-Permen/R-Perka; arahan/disposisi Pimpinan), dokumen pembahasan/harmonisasi, hasil rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, dan rekapitulasi rekomendasi R-Permen/R-Perka.



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- 04.04 Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika
Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika, antara lain: bahan kajian dan pemberian rekomendasi atas R-Permen/R-Perka yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden (surat permohonan, naskah urgensi, dan R-Permen/R-Perka; arahan/disposisi Pimpinan), dokumen pembahasan/harmonisasi, hasil rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, dan rekapitulasi rekomendasi R-Permen/R-Perka.
- 04.05 Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha
Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha, antara lain: bahan kajian dan pemberian rekomendasi atas R-Permen/R-Perka yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden (surat permohonan, naskah urgensi, dan R-Permen/R-Perka; arahan/disposisi Pimpinan), dokumen pembahasan/harmonisasi, hasil rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, dan rekapitulasi rekomendasi R-Permen/R-Perka.
- 04.06 Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan, antara lain: bahan kajian dan pemberian rekomendasi atas R-Permen/R-Perka yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden (surat permohonan, naskah urgensi, dan R-Permen/R-Perka; arahan/disposisi Pimpinan), dokumen pembahasan/harmonisasi, hasil rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, dan rekapitulasi rekomendasi R-Permen/R-Perka.

04.07 Pengembangan Usaha dan Wilayah

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pengembangan usaha dan wilayah, antara lain: bahan kajian dan pemberian rekomendasi atas R-Permen/R-Perka yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden (surat permohonan, naskah urgensi, dan R-Permen/R-Perka; arahan/disposisi Pimpinan), dokumen pembahasan/harmonisasi, hasil rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, dan rekapitulasi rekomendasi R-Permen/R-Perka.

04.08 Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan inovasi, antara lain: bahan kajian dan pemberian rekomendasi atas R-Permen/R-Perka yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden (surat permohonan, naskah urgensi, dan R-Permen/R-Perka; arahan/disposisi Pimpinan), dokumen



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

pembahasan/harmonisasi, hasil rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, dan rekapitulasi rekomendasi R-Permen/R-Perka.

04.09 Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga, antara lain: bahan kajian dan pemberian rekomendasi atas R-Permen/R-Perka yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden (surat permohonan, naskah urgensi, dan R-Permen/R-Perka; arahan/disposisi Pimpinan), dokumen pembahasan/harmonisasi, hasil rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, dan rekapitulasi rekomendasi R-Permen/R-Perka.

04.10 Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, antara lain: bahan kajian dan pemberian rekomendasi atas R-Permen/R-Perka yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden (surat permohonan, naskah urgensi, dan R-Permen/R-Perka; arahan/disposisi Pimpinan), dokumen pembahasan/harmonisasi, hasil rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, dan rekapitulasi rekomendasi R-Permen/R-Perka.



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

- 22 -

04.11 Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, antara lain: bahan kajian dan pemberian rekomendasi atas R-Permen/R-Perka yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden (surat permohonan, naskah urgensi, dan R-Permen/R-Perka; arahan/ disposisi Pimpinan), dokumen pembahasan/harmonisasi, hasil rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, dan rekapitulasi rekomendasi R-Permen/R-Perka.

04.12 Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi, antara lain: bahan kajian dan pemberian rekomendasi atas R-Permen/R-Perka yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden (surat permohonan, naskah urgensi, dan R-Permen/R-Perka; arahan/ disposisi Pimpinan), dokumen pembahasan/harmonisasi, hasil rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, dan rekapitulasi rekomendasi R-Permen/R-Perka.

04.13 Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian-



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

an/Lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan, antara lain: bahan kajian dan pemberian rekomendasi atas R-Permen/R-Perka yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden (surat permohonan, naskah urgensi, dan R-Permen/R-Perka; arahan/disposisi Pimpinan), dokumen pembahasan/harmonisasi, hasil rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, dan rekapitulasi rekomendasi R-Permen/R-Perka.

04.14 Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup, antara lain: bahan kajian dan pemberian rekomendasi atas R-Permen/R-Perka yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden (surat permohonan, naskah urgensi, dan R-Permen/R-Perka; arahan/disposisi Pimpinan), dokumen pembahasan/harmonisasi, hasil rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, dan rekapitulasi rekomendasi R-Permen/R-Perka.

04.15 Perhubungan dan Pekerjaan Umum

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang perhubungan dan pekerjaan umum, antara lain: bahan kajian dan pemberian rekomendasi atas R-Permen/R-Perka yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden (surat permohonan, naskah urgensi, dan R-Permen/R-Perka;



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

arahan/disposisi Pimpinan), dokumen pembahasan/harmonisasi, hasil rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, dan rekapitulasi rekomendasi R-Permen/R-Perka.

04.16 Penanaman Modal dan Kepariwisata

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang penanaman modal dan kepariwisataan, antara lain: bahan kajian dan pemberian rekomendasi atas R-Permen/R-Perka yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden (surat permohonan, naskah urgensi, dan R-Permen/R-Perka; arahan/disposisi Pimpinan), dokumen pembahasan/harmonisasi, hasil rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, dan rekapitulasi rekomendasi R-Permen/R-Perka.

05 Penyampaian Rekomendasi atas Hasil Pengamatan Dan Penyerapan Pandangan terhadap Perkembangan Umum

05.01 Pemerintahan Dalam Negeri

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyampaian rekomendasi dalam rangka penetapan kebijakan dan program yang akan dijalankan berdasar hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pemerintahan dalam negeri, antara lain: bahan kajian/rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum (berita isu strategis; arahan Pimpinan), dokumen perencanaan kegiatan, hasil pengamatan dan penyerapan pandangan (FGD, rapat koordinasi, bahan pustaka, monitoring, laporan pengamatan), hasil kajian dan rekomendasi atas pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, serta dokumen publikasi.



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- 05.02 Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyampaian rekomendasi dalam rangka penetapan kebijakan dan program yang akan dijalankan berdasar hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara, antara lain: bahan kajian/rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum (berita isu strategis; arahan Pimpinan), dokumen perencanaan kegiatan, hasil pengamatan dan penyerapan pandangan (FGD, rapat koordinasi, bahan pustaka, monitoring, laporan pengamatan), hasil kajian dan rekomendasi atas pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, serta dokumen publikasi.
- 05.03 Hubungan Internasional
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyampaian rekomendasi dalam rangka penetapan kebijakan dan program yang akan dijalankan berdasar hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang hubungan internasional, antara lain: bahan kajian/rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum (berita isu strategis; arahan Pimpinan), dokumen perencanaan kegiatan, hasil pengamatan dan penyerapan pandangan (FGD, rapat koordinasi, bahan pustaka, monitoring, laporan pengamatan), hasil kajian dan rekomendasi atas pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, serta dokumen publikasi.
- 05.04 Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyampaian rekomendasi dalam rangka penetapan kebijakan dan program yang akan dijalankan berdasar hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika, antara lain: bahan kajian/rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum (berita isu strategis; arahan Pimpinan), dokumen perencanaan kegiatan, hasil pengamatan dan penyerapan pandangan (FGD, rapat koordinasi, bahan



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- pustaka, monitoring, laporan pengamatan), hasil kajian dan rekomendasi atas pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, serta dokumen publikasi.
- 05.05 Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyampaian rekomendasi dalam rangka penetapan kebijakan dan program yang akan dijalankan berdasar hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha, antara lain: bahan kajian/rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum (berita isu strategis; arahan Pimpinan), dokumen perencanaan kegiatan, hasil pengamatan dan penyerapan pandangan (FGD, rapat koordinasi, bahan pustaka, monitoring, laporan pengamatan), hasil kajian dan rekomendasi atas pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, serta dokumen publikasi.
- 05.06 Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyampaian rekomendasi dalam rangka penetapan kebijakan dan program yang akan dijalankan berdasar hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan, antara lain: bahan kajian/rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum (berita isu strategis; arahan Pimpinan), dokumen perencanaan kegiatan, hasil pengamatan dan penyerapan pandangan (FGD, rapat koordinasi, bahan pustaka, monitoring, laporan pengamatan), hasil kajian dan rekomendasi atas pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, serta dokumen publikasi.
- 05.07 Pengembangan Usaha dan Wilayah
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyampaian rekomendasi dalam rangka penetapan kebijakan dan program yang akan dijalankan berdasar hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

di bidang pengembangan usaha dan wilayah, antara lain: bahan kajian/rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum (berita isu strategis; arahan Pimpinan), dokumen perencanaan kegiatan, hasil pengamatan dan penyerapan pandangan (FGD, rapat koordinasi, bahan pustaka, monitoring, laporan pengamatan), hasil kajian dan rekomendasi atas pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, serta dokumen publikasi.

05.08 Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyampaian rekomendasi dalam rangka penetapan kebijakan dan program yang akan dijalankan berdasar hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan Inovasi, antara lain: bahan kajian/rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum (berita isu strategis; arahan Pimpinan), dokumen perencanaan kegiatan, hasil pengamatan dan penyerapan pandangan (FGD, rapat koordinasi, bahan pustaka, monitoring, laporan pengamatan), hasil kajian dan rekomendasi atas pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, serta dokumen publikasi.

05.09 Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga.

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyampaian rekomendasi dalam rangka penetapan kebijakan dan program yang akan dijalankan berdasar hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga, antara lain: bahan kajian/rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum (berita isu strategis; arahan Pimpinan), dokumen perencanaan kegiatan, hasil pengamatan dan penyerapan pandangan (FGD, rapat koordinasi, bahan pustaka, monitoring, laporan pengamatan), hasil kajian dan rekomendasi atas pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, serta dokumen publikasi.



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- 05.10 Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyampaian rekomendasi dalam rangka penetapan kebijakan dan program yang akan dijalankan berdasar hasil pengamatan dan penyerapan pandang-an terhadap perkembangan umum di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, antara lain: bahan kajian/rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum (berita isu strategis; arahan Pimpinan), dokumen perencanaan kegiatan, hasil pengamatan dan penyerapan pandangan (FGD, rapat koordinasi, bahan pustaka, monitoring, laporan pengamatan), hasil kajian dan rekomendasi atas pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, serta dokumen publikasi.
- 05.11 Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyampaian rekomendasi dalam rangka penetapan kebijakan dan program yang akan dijalankan berdasar hasil pengamatan dan penyerapan pandang-an terhadap perkembangan umum di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, antara lain: bahan kajian/rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum (berita isu strategis; arahan Pimpinan), dokumen perencanaan kegiatan, hasil pengamatan dan penyerapan pandangan (FGD, rapat koordinasi, bahan pustaka, monitoring, laporan pengamatan), hasil kajian dan rekomendasi atas pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, serta dokumen publikasi.
- 05.12 Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyampaian rekomendasi dalam rangka penetapan kebijakan dan program yang akan dijalankan berdasar hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi, antara lain: bahan kajian/rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum (berita isu strategis; arahan Pimpinan), dokumen perencanaan kegiatan, hasil pengamatan dan



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

penyerapan pandangan (FGD, rapat koordinasi, bahan pustaka, monitoring, laporan pengamatan), hasil kajian dan rekomendasi atas pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, serta dokumen publikasi.

05.13 Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyampaian rekomendasi dalam rangka penetapan kebijakan dan program yang akan dijalankan berdasar hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan, antara lain: bahan kajian/rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum (berita isu strategis; arahan Pimpinan), dokumen perencanaan kegiatan, hasil pengamatan dan penyerapan pandangan (FGD, rapat koordinasi, bahan pustaka, monitoring, laporan pengamatan), hasil kajian dan rekomendasi atas pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, serta dokumen publikasi.

05.14 Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyampaian rekomendasi dalam rangka penetapan kebijakan dan program yang akan dijalankan berdasar hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup, antara lain: bahan kajian/rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum (berita isu strategis; arahan Pimpinan), dokumen perencanaan kegiatan, hasil pengamatan dan penyerapan pandangan (FGD, rapat koordinasi, bahan pustaka, monitoring, laporan pengamatan), hasil kajian dan rekomendasi atas pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, serta dokumen publikasi.

05.15 Perhubungan dan Pekerjaan Umum

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyampaian rekomendasi dalam rangka penetapan kebijakan dan program yang akan dijalankan berdasar hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perhubungan dan pekerjaan umum, antara lain: bahan kajian/rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum (berita isu strategis; arahan Pimpinan), dokumen perencanaan kegiatan, hasil pengamatan dan penyerapan



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

pandangan (FGD, rapat koordinasi, bahan pustaka, monitoring, laporan pengamatan), hasil kajian dan rekomendasi atas pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, serta dokumen publikasi.

05.16 Penanaman Modal dan Kepariwisata

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyampaian rekomendasi dalam rangka penetapan kebijakan dan program yang akan dijalankan berdasar hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang penanaman modal dan kepariwisataan, antara lain: bahan kajian/rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum (berita isu strategis; arahan Pimpinan), dokumen perencanaan kegiatan, hasil pengamatan dan penyerapan pandangan (FGD, rapat koordinasi, bahan pustaka, monitoring, laporan pengamatan), hasil kajian dan rekomendasi atas pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, serta dokumen publikasi.

06 Penyiapan Bahan Substansi Sidang Kabinet, Rapat, atau Pertemuan yang Dipimpin dan/atau Dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

06.01 Pemerintahan Dalam Negeri

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pemerintahan dalam negeri, antara lain: surat dari K/L terkait, berita/isu strategis, jadwal sidang, arahan pimpinan, serta dokumen penyiapan bahan dan penyampaian rekomendasi.

06.02 Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara, antara lain: surat dari K/L terkait, berita/isu strategis, jadwal sidang, arahan pimpinan, serta dokumen penyiapan bahan dan penyampaian rekomendasi.

06.03 Hubungan Internasional

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

Presiden di bidang hubungan internasional, antara lain: surat dari K/L terkait, berita/isu strategis, jadwal sidang, arahan pimpinan, serta dokumen penyiapan bahan dan penyampaian rekomendasi.

- 06.04 Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika, antara lain: surat dari K/L terkait, berita/isu strategis, jadwal sidang, arahan pimpinan, serta dokumen penyiapan bahan dan penyampaian rekomendasi.
- 06.05 Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha, antara lain: surat dari K/L terkait, berita/isu strategis, jadwal sidang, arahan pimpinan, serta dokumen penyiapan bahan dan penyampaian rekomendasi.
- 06.06 Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan, antara lain: surat dari K/L terkait, berita/isu strategis, jadwal sidang, arahan pimpinan, serta dokumen penyiapan bahan dan penyampaian rekomendasi.
- 06.07 Pengembangan Usaha dan Wilayah
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pengembangan usaha dan wilayah, antara lain: surat dari K/L terkait, berita/isu strategis, jadwal sidang, arahan pimpinan, serta dokumen penyiapan bahan dan penyampaian rekomendasi.
- 06.08 Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

- Presiden di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan inovasi, antara lain: surat dari K/L terkait, berita/isu strategis, jadwal sidang, arahan pimpinan, serta dokumen penyiapan bahan dan penyampaian rekomendasi.
- 06.09 Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga, antara lain: surat dari K/L terkait, berita/isu strategis, jadwal sidang, arahan pimpinan, serta dokumen penyiapan bahan dan penyampaian rekomendasi.
- 06.10 Pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, antara lain: surat dari K/L terkait, berita/isu strategis, jadwal sidang, arahan pimpinan, serta dokumen penyiapan bahan dan penyampaian rekomendasi.
- 06.11 Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, antara lain: surat dari K/L terkait, berita/isu strategis, jadwal sidang, arahan pimpinan, serta dokumen penyiapan bahan dan penyampaian rekomendasi.
- 06.12 Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi, antara lain: surat dari K/L terkait, berita/isu strategis, jadwal sidang, arahan pimpinan, serta dokumen penyiapan bahan dan penyampaian rekomendasi.
- 06.13 Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

Presiden di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan, antara lain: surat dari K/L terkait, berita/isu strategis, jadwal sidang, arahan pimpinan, serta dokumen penyiapan bahan dan penyampaian rekomendasi.

06.14 Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup, antara lain: surat dari K/L terkait, berita/isu strategis, jadwal sidang, arahan pimpinan, serta dokumen penyiapan bahan dan penyampaian rekomendasi.

06.15 Perhubungan dan Pekerjaan Umum

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perhubungan dan pekerjaan umum, antara lain: surat dari K/L terkait, berita/isu strategis, jadwal sidang, arahan pimpinan, serta dokumen penyiapan bahan dan penyampaian rekomendasi.

06.16 Penanaman Modal dan Kepariwisata

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang penanaman modal dan kepariwisataan, antara lain: surat dari K/L terkait, berita/isu strategis, jadwal sidang, arahan pimpinan, serta dokumen penyiapan bahan dan penyampaian rekomendasi.

DK. DUKUNGAN KERJA KABINET

01 Penyelenggaraan Sidang Kabinet

01.01 Persiapan Sidang Kabinet

Naskah-naskah yang berkaitan dengan persiapan sidang kabinet di bidang politik, hukum dan keamanan, perekonomian, pembangunan manusia dan kebudayaan, serta kemaritiman dan investasi, antara lain: usulan Presiden/Kementerian/Lembaga, dokumen terkait penjadwalan sidang kabinet, persiapan perlengkapan dan jamuan, serta laporan persiapan sidang kabinet.



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

- 01.02 Pelaksanaan Sidang Kabinet
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan sidang kabinet di bidang politik, hukum dan keamanan, perekonomian, pembangunan manusia dan kebudayaan, serta kemaritiman dan investasi, antara lain: data agenda persidangan dan bahan paparan sidang.

02 Penyelenggaraan Rapat Terbatas

- 02.01 Persiapan Rapat Terbatas
Naskah-naskah yang berkaitan dengan persiapan rapat terbatas di bidang politik, hukum dan keamanan, perekonomian, pembangunan manusia dan kebudayaan, serta kemaritiman dan investasi, antara lain: usulan Presiden/Kementerian/Lembaga, dokumen terkait penjadwalan rapat terbatas, persiapan perlengkapan dan jamuan, serta laporan persiapan rapat terbatas.
- 02.02 Pelaksanaan Rapat Terbatas
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan rapat terbatas di bidang politik, hukum dan keamanan, perekonomian, pembangunan manusia dan kebudayaan, serta kemaritiman dan investasi, antara lain: data agenda rapat dan bahan paparan rapat.

03 Penyelenggaraan Pertemuan

- 03.01 Persiapan Pertemuan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan persiapan pertemuan di bidang politik, hukum dan keamanan, perekonomian, pembangunan manusia dan kebudayaan, serta kemaritiman dan investasi, antara lain: usulan Presiden/Kementerian/Lembaga, dokumen terkait penjadwalan pertemuan, persiapan perlengkapan dan jamuan, serta laporan persiapan pertemuan.
- 03.02 Pelaksanaan Pertemuan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pertemuan di bidang politik, hukum dan keamanan, perekonomian, pembangunan manusia dan kebudayaan, serta kemaritiman dan investasi, antara lain: data agenda pertemuan dan bahan paparan pertemuan.



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

04 Penyelenggaraan Rapat Internal

04.01 Persiapan Rapat Internal

Naskah-naskah yang berkaitan dengan persiapan rapat internal di bidang politik, hukum dan keamanan, perekonomian, pembangunan manusia dan kebudayaan, serta kemaritiman dan investasi, antara lain: usulan Presiden/Kementerian/Lembaga, dokumen terkait penjadwalan rapat internal, persiapan perlengkapan dan jamuan, serta laporan persiapan rapat internal.

04.02 Pelaksanaan Rapat Internal

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan rapat internal di bidang politik, hukum dan keamanan, perekonomian, pembangunan manusia dan kebudayaan, serta kemaritiman dan investasi, antara lain: data agenda rapat internal dan bahan paparan rapat internal.

05 Pelaporan

05.01 Hasil Sidang Kabinet

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaporan dan diseminasi hasil sidang kabinet, antara lain: hasil perekaman, transkripsi, arahan Presiden, dan risalah.

05.02 Hasil Rapat Terbatas

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaporan dan diseminasi hasil rapat terbatas, antara lain: hasil perekaman, transkripsi, arahan Presiden, dan risalah.

05.03 Hasil Pertemuan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaporan dan diseminasi hasil pertemuan, antara lain: hasil perekaman, transkripsi, arahan Presiden, dan risalah.

05.04 Hasil Rapat Internal

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaporan dan diseminasi hasil rapat internal, antara lain: hasil perekaman, transkripsi, arahan Presiden, dan risalah.

06 Penyiapan Naskah dan Penerjemahan

06.01 Naskah Kepresidenan/Kenegaraan dan Pimpinan

Naskah-naskah yang berkenaan dengan tugas melaksanakan analisis, koordinasi, dan penyiapan naskah surat dan dokumen Kepresidenan/Kenegaraan dan Pimpinan, antara lain: korespondensi surat Presiden kepada Kepala Negara/Pemerintahan dan Kepala Organisasi Internasional,



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

- pidato Presiden pada acara internasional, sambutan/kata pengantar tertulis Presiden, korespondensi surat Sekretaris Kabinet dan Deputi, serta pidato/sambutan Sekretaris Kabinet dan Deputi.
- 06.02 Naskah Perwakilan Diplomatik/Konsuler Republik Indonesia
Naskah yang berkenaan dengan tugas melaksanakan analisis, koordinasi, dan penyiapan naskah surat dan dokumen penempatan dan penarikan kembali Kepala Perwakilan Diplomatik/Konsuler Republik Indonesia, antara lain: Surat Kepercayaan (*Letter of Credence*) dan Surat Penarikan Kembali (*Letter of Recall*) Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia, dan Surat Tauliah (*Letter of Commission*) Konsul Jenderal/Konsul/Konsul Kehormatan Republik Indonesia.
- 06.03 Naskah Perwakilan Diplomatik/Konsuler Asing
Naskah-naskah yang berkenaan dengan tugas melaksanakan analisis, koordinasi, dan penyiapan naskah surat dan dokumen penempatan Perwakilan Diplomatik/Konsuler Asing, antara lain: Surat Presiden RI Kepada Ketua DPR RI mengenai Permohonan Pertimbangan bagi Pencalonan Dubes LBBP Negara Sahabat untuk RI dan Surat Pengakuan (*Exequatur*) Konsul Jenderal/Konsul/Konsul Kehormatan negara sahabat.
- 06.04 Penerjemahan Tulis Naskah Kepresidenan/Kenegaraan dan Pimpinan
Naskah yang berkenaan dengan tugas melaksanakan analisis, pengalihan bahasa, dan penyerasian naskah tertulis Kepresidenan/Kenegaraan dan Pimpinan di bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian, pembangunan manusia kebudayaan, kemaritiman dan investasi, antara lain: terjemahan rancangan naskah Pidato Kenegaraan tanggal 17 Agustus, terjemahan rancangan naskah pidato penyampaian RAPBN beserta nota keuangannya, terjemahan artikel *website* setkab.go.id, terjemahan produk perundang-undangan (PUU), dan terjemahan pidato/sambutan/kata pengantar Presiden.



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

- 06.05 Penerjemahan Lisan pada Acara Kepresidenan/Kenegaraan dan Pimpinan
Naskah yang berkenaan dengan tugas melaksanakan penerjemahan lisan pada acara Kepresidenan/Kenegaraan dan Sekretariat Kabinet, antara lain: terjemahan lisan pidato pada acara kepresidenan/kenegaraan dan terjemahan lisan pada acara Sekretariat Kabinet.
- 06.06 Dukungan Data Penerjemahan
Naskah-naskah yang berkenaan dengan tugas melaksanakan penyusunan dan pengelolaan glosarium, kamus, dan referensi lainnya.
- 06.07 Verbatim Pidato Kepresidenan/Kenegaraan
Naskah-naskah yang berkenaan dengan tugas perekaman dan pencatatan verbatim Pidato Kepresidenan/Kenegaraan antara lain: Rekaman Audio/Transkrip/Pointers Pidato/Sambutan/Doorstop Presiden, dan Himpunan Pidato/Sambutan Presiden, Rekaman Audio Pertemuan Presiden dengan Pimpinan Negara Lain (Bilateral; Multilateral), dan Buku Tematik Kebijakan Presiden dalam Kumpulan Pidato/Sambutan Presiden.
- 06.08 Janji dan Arahan Presiden dalam Pidato Presiden pada Acara Kepresidenan/Kenegaraan.
Naskah-naskah yang berkenaan dengan tugas melaksanakan penyusunan arahan dan janji Presiden dalam Pidato/Sambutan/Doorstop pada acara Kepresidenan/Kenegaraan, antara lain: matriks janji Presiden, surat Sekretaris Kabinet kepada para Menteri Kabinet dan Kepala Lembaga Negara mengenai penyampaian arahan Presiden dalam Pidato/Sambutan/Doorstop Presiden pada acara Kepresidenan/Kenegaraan.
- 06.09 Korespondensi Ibu Negara
Naskah-naskah yang berkenaan dengan tugas penyiapan korespondensi Ibu Negara, antara lain surat Ibu Negara.

PA. DUKUNGAN PENYELENGGARAAN TIM PENILAI AKHIR

01 Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya

- 01.01 Penerimaan Usulan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan usulan instansi, antara lain: surat permohonan/pengantar, nilai hasil seleksi, foto, bukti SPT, bukti LHKPN, daftar riwayat hidup.



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

- 01.02 Penyiapan Bahan Sidang Tim Penilai Akhir
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan bahan sidang tim penilai akhir, antara lain: rekapitulasi usulan, paparan sidang TPA, lembar persetujuan, surat undangan sidang TPA, surat *clearance* BIN, dan surat pertimbangan PPATK.
- 01.03 Pengajuan dan Penyelesaian Keputusan Presiden (Keppres)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan bahan sidang Tim Penilai Akhir, antara lain: memorandum, rancangan Keputusan Presiden, salinan dan petikan Keputusan Presiden, surat pengantar, surat usulan ralat, surat perbaikan (opsional).

02 Pemberian Dukungan Pemikiran, Teknis, dan Administrasi dalam Pengangkatan, Pemindehan, dan Pemberhentian Pejabat Lainnya

- 02.01 Penerimaan Usulan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan usulan instansi, antara lain: surat permohonan/pengantar dan daftar riwayat hidup.
- 02.02 Dokumen Pengajuan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen pengajuan, antara lain: lembar persetujuan dan memorandum.

03 Pembentukan Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Utama/Madya Tertentu

- 03.01 Penerimaan Usulan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan usulan Instansi, antara lain: surat permohonan/pengantar.
- 03.02 Pengajuan dan Penyelesaian Keputusan Presiden
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengajuan dan penyelesaian Keputusan Presiden, antara lain: memorandum, rancangan Keputusan Presiden, salinan Keputusan Presiden, dan surat pengantar.



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

04 Penunjukan Pelaksana Tugas Pejabat Pimpinan Tinggi Utama/Madya Tertentu

04.01 Penerimaan Usulan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan usulan Instansi, antara lain: surat permohonan/pengantar.

04.02 Pengajuan dan Penyelesaian Keputusan Presiden

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengajuan dan penyelesaian keputusan Presiden, antara lain: memorandum, rancangan Keputusan Presiden, salinan Keputusan Presiden, dan surat pengantar.

05 Penyampaian Laporan Kepada Presiden

05.01 Penerimaan Usulan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan usulan Instansi, antara lain: surat permohonan/pengantar.

05.02 Penyiapan Laporan dan Penyelesaian

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan laporan dan penyelesaian, antara lain: memorandum kepada Presiden dan surat Sekretaris Kabinet kepada Instansi pengusul.

JP. JABATAN FUNGSIONAL PENERJEMAH

01 Perencanaan dan Pengembangan Program Pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah

01.01 Penyusunan Sistem/Peraturan Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Penerjemah

Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen penyusunan sistem/peraturan/penyelenggaraan Jabatan Fungsional Penerjemah, sejak rancangan awal hingga rancangan final.

01.02 Sosialisasi Jabatan Fungsional Penerjemah

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan sosialisasi, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga laporan hasil sosialisasi.

01.03 Persiapan Penyelenggaraan Kerja Sama

Naskah-naskah yang berkaitan dengan persiapan kegiatan kerja sama mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi, antara lain dokumen rancangan *MoU*/perjanjian kerja sama.

01.04 Fasilitasi dan Pembinaan Organisasi Profesi Penerjemah

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi dan pembinaan organisasi profesi penerjemah antara lain: kerja sama dengan Ikatan Penerjemah Pemerintah Indonesia (IPPI), kode etik, dan dokumen hasil koordinasi.



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

- 01.05 Studi Banding dan Riset
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan studi banding dan riset, mulai dari persiapan, pelaksanaan hingga laporan hasil studi banding dan hasil kajian.

02 Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Penerjemah

- 02.01 Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan perencanaan pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional penerjemah antara lain: dokumen perencanaan kebutuhan, dokumen sistem metode, kurikulum/silabus, bahan ajar/modul, konsultasi dan pembinaan penyelenggara pendidikan dan pelatihan.
- 02.02 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional dan pendidikan dan pelatihan teknis, antara lain: dokumen persiapan penyelenggaraan diklat, penerjemahan lisan, penerjemahan tulis, penyusunan naskah bahan terjemahan, pengalihaksaraan dan penerjemahan teks naskah kuno/arsip kuno/prasasti, dan lainnya.
- 02.03 Evaluasi dan Pelaporan Pendidikan dan Pelatihan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan evaluasi dan pelaporan diklat seperti: laporan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan dokumen survei kepuasan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- 02.04 Tenaga Pengajar
Naskah-naskah yang berkaitan dengan *database* tenaga pengajar.
- 02.05 Peserta Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Penerjemah
Naskah-naskah yang berkaitan dengan *database* peserta pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Penerjemah.

03 Rekomendasi Pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah

- 03.01 Rekomendasi Penetapan Angka Kredit
Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen penetapan angka kredit, antara lain: dokumen daftar usul penetapan angka kredit, penetapan angka kredit, dan konversi angka kredit.



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

- 03.02 Rekomendasi Pengangkatan dalam Jabatan, Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Kembali, serta Pemberhentian dari Jabatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan rekomendasi pengangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat/golongan, pemberhentian sementara dan pengangkatan kembali, serta pemberhentian dari jabatan, antara lain: dokumen surat persetujuan formasi penerjemah, rekomendasi pengangkatan dalam jabatan (pengangkatan jabatan fungsional penerjemah baru), rekomendasi kenaikan jabatan, rekomendasi kenaikan pangkat/golongan, rekomendasi pemberhentian sementara, rekomendasi pengangkatan kembali, surat persetujuan pengunduran diri penerjemah dan dokumen pemberhentian dalam jabatan.
- 03.03 Rekomendasi Penilaian Kinerja dan Uji Kompetensi Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen penilaian kinerja jabatan fungsional penerjemah, dokumen penyelenggaraan uji kompetensi, dokumen sertifikat kelulusan uji kompetensi jabatan fungsional penerjemah.
- 03.04 Rekomendasi Penilaian Akreditasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen akreditasi badan/lembaga penyelenggara diklat dan dokumen konsultasi pembinaan penyelenggara pendidikan dan pelatihan.

04 Monitoring dan Evaluasi Penerapan dan Penjaminan Kualitas Jabatan Fungsional Penerjemah

- 04.01 Monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Penerjemah Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan jabatan fungsional penerjemah, koordinasi dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Instansi pengguna jabatan fungsional penerjemah, dan sertifikasi kepakaran jabatan fungsional penerjemah.



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

04.02 Pengembangan Karir Jabatan Fungsional Penerjemah
Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen bimbingan teknis (bimtek) pengembangan karir jabatan fungsional penerjemah, analisis kebutuhan pelatihan teknis dan fungsional, dan penyusunan/penerbitan Jurnal Ilmiah Penerjemah.

05 Pengelolaan dan Diseminasi Informasi Pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah

05.01 Pengelolaan Data JFP

Naskah-naskah yang berkaitan dengan basis data JFP, antara lain: *database* JFP dan konten sistem informasi JFP.

05.02 Diseminasi Informasi Pembinaan JFP

Naskah-naskah yang berkaitan dengan diseminasi informasi pembinaan JFP, antara lain: artikel berita dan konten media sosial terkait dengan JFP.

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRAMONO ANUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Administrasi,



Farid Utomo



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 7 TAHUN 2022
TANGGAL : 22 SEPTEMBER 2022

FUNGSI FASILITATIF

PR. PERENCANAAN

01 Program dan Anggaran

- 01.01 Penyusunan Rencana Strategis
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan rencana strategis, antara lain: dokumen rencana strategis Sekretariat Kabinet dan Eselon I dan II di lingkungan Sekretariat Kabinet
- 01.02 Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen kesepakatan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengenai pagu indikatif, pagu anggaran dan alokasi anggaran Sekretariat Kabinet.
- 01.03 Penyusunan Program Kerja Sekretariat Kabinet
Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen program kerja Sekretariat Kabinet.
- 01.04 Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Kabinet
Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen penyusunan rencana kerja Sekretariat Kabinet.
- 01.05 Pelaksanaan Revisi Rencana Kerja Sekretariat Kabinet
Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen pelaksanaan revisi rencana kerja Sekretariat Kabinet.



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- 01.06 Penyusunan Lembar Catatan Hasil Pertemuan Tiga Pihak Sekretariat Kabinet dengan Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Naskah-naskah yang berkaitan dengan lembar catatan hasil pertemuan tiga pihak Sekretariat Kabinet dengan Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- 01.07 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pagu Anggaran Sekretariat Kabinet
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pagu Anggaran Sekretariat Kabinet.
- 01.08 Penyusunan Nota Keuangan RAPBN Sekretariat Kabinet
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penyusunan Nota Keuangan RAPBN Sekretariat Kabinet.
- 01.09 Penyampaian Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada DPR RI
Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen kesimpulan Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI.
- 01.10 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Alokasi Anggaran Sekretariat Kabinet
Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Alokasi Anggaran Sekretariat Kabinet.
- 01.11 Penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Sekretariat Kabinet
Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Sekretariat Kabinet.
- 01.12 Pelaksanaan Revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen pelaksanaan revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- 01.13 Penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Kabinet
Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Kabinet.
- 01.14 Pelaksanaan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen pelaksanaan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
- 01.15 Penyusunan Satuan Biaya Pelayanan/Kegiatan di Lingkungan Sekretariat Kabinet
Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen penyusunan Satuan Biaya Pelayanan/Kegiatan di lingkungan Sekretariat Kabinet.

02 Pemantauan dan Evaluasi

- 02.01 Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran
Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen data capaian pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran, dokumen laporan periodik/berkala hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran (laporan evaluasi semester, laporan evaluasi tahunan), dan dokumen pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran lainnya.

KU. KEUANGAN

01 Pengelolaan Perbendaharaan

- 01.01 Dokumen Penerimaan Negara
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pajak, antarlain: Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), dan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB).



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- 01.02 Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran antara lain: Surat Perintah Membayar (SPM-UP/TUP/GUP/LS), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Tanggung Jawab Belanja (SPTB), Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP), dan bukti tagihan pihak ketiga/kuitansi/dokumen pendukung lainnya.
- 01.03 Dokumen Bendahara Pengeluaran
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Buku Kas Umum (BKU), Buku Kas Pembantu (BKP), Buku Kas Pembantu (BKP) Pajak, Buku Kas Pembantu (BKP) Kas Tunai, Buku Kas Pembantu (BKP) Kas Bank, Buku Pengawasan Anggaran, Rekening Koran Bank, Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran, dan Berita Acara Pemeriksaan Kas.
- 01.04 Keputusan Pengguna Anggaran dan/atau Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penetapan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan surat keputusan Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan SPM (PPSPM), Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP), Bendahara Pengeluaran (BP), Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), Staf Pengelola Keuangan (SPK), dan SK Penetapan Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada Satuan Kerja dan Unit Eselon I Sekretariat Kabinet.
- 01.05 Ketatausahaan Keuangan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengelolaan rekening pemerintah, kartu kredit pemerintah, dan pengelolaan uang persediaan.

02 Penyusunan Laporan Keuangan

- 02.01 Pendukung Laporan Keuangan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Berita Acara Rekonsiliasi Antara Satuan Kerja dan KPPN, Berita Acara Rekonsiliasi Antara Pengelola BMN dan Pengelola SAI, dan



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Berita Acara Rekonsiliasi Tiga Pihak antara Sekretariat Kabinet, Kementerian Keuangan, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

02.02 Laporan Keuangan Tahunan (*Audited*)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dan Daftar Lampiran Pendukung Laporan Keuangan.

02.03 Laporan Keuangan Semesteran

Naskah-naskah yang berkaitan dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), dan Daftar Lampiran Pendukung Laporan Keuangan.

02.04 Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI

Naskah-naskah yang berkaitan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Laporan Keuangan, Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Sistem Pengendalian Internal, Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Kepatuhan terhadap Perundang-undangan.

02.05 Dokumen Penyelesaian Kerugian Negara

Naskah-naskah yang berkaitan penyelesaian kerugian, antara lain: SK Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN), Peraturan Sekretaris Kabinet tentang Penyelesaian Kerugian, dan dokumen administrasi lainnya (Surat keterangan Tanggung Jawab Mutlak, Surat Pemberitahuan Ganti Rugi, Surat Keputusan Pembebanan Sementara, dan dokumen pendukung lainnya).

03 Belanja Pegawai

03.01 Pajak Pribadi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen pajak pribadi.



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- 03.02 Gaji dan Tunjangan yang Melekat pada Gaji
Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji.
- 03.03 Tunjangan Kinerja
Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen tunjangan kinerja.
- 03.04 Uang Makan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen uang makan.
- 03.05 Uang Makan/Uang Lembur
Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen uang makan/uang lembur.
- 03.06 Hak keuangan bagi ASN dan pegawai Non ASN pada Staf Khusus Presiden dan Wakil Presiden dan Utusan Khusus Presiden
Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen hak keuangan bagi ASN dan pegawai Non ASN pada Staf Khusus Presiden dan Wakil Presiden dan Utusan Khusus Presiden
- 03.07 Rapel: Gaji, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Kinerja, Pegawai Pensiun
Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen rapel, antara lain: gaji, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, dan pegawai pensiun.
- 03.08 Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Gaji (SKPP)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Gaji (SKPP).
- 03.09 Uang Duka Wafat dan Gaji Terusan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen uang duka wafat dan gaji terusan.
- 04 Hibah**
- 04.01 Perjanjian Kerja Sama
Naskah-naskah yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama.



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- 04.02 Berita Acara Serah Terima
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Berita Acara Serah Terima.
- 04.03 Surat Permohonan Registrasi Hibah
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Surat Permohonan Registrasi Hibah.
- 04.04 Laporan Penggunaan Hibah
Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan penggunaan hibah.

HK. HUKUM

01 Produk Hukum yang Bersifat Pengaturan

- 01.01 Peraturan Sekretaris Kabinet
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan dan penetapan Peraturan Sekretaris Kabinet antara lain: permohonan/pengusulan, penelaahan hukum/perumusan, penetapan peraturan, dan pengundangan.
- 01.02 Peraturan Deputy Bidang Administrasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan dan penetapan Peraturan Deputy Bidang Administrasi antara lain: permohonan/pengusulan, penelaahan hukum/perumusan, hingga penetapan peraturan.

02 Produk Hukum yang Bersifat Penetapan/Keputusan

- 02.01 Keputusan Sekretaris Kabinet
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan dan penetapan keputusan/ketetapan Sekretaris Kabinet, antara lain: permohonan/pengusulan, penelaahan hukum/perumusan, hingga penetapan keputusan.
- 02.02 Keputusan Deputy Bidang Administrasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan dan penetapan keputusan/ketetapan Deputy Bidang Administrasi, antara lain: permohonan/pengusulan, penelaahan hukum/perumusan, hingga penetapan keputusan.



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

03 Instruksi/Surat Edaran

03.01 Instruksi/Surat Edaran Sekretaris Kabinet.

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan dan penetapan instruksi/surat edaran Sekretaris Kabinet, antara lain: permohonan/pengusulan instruksi/surat edaran, penelaahan hukum/perumusan, hingga penetapan instruksi/surat edaran.

03.02 Surat Edaran Deputy Bidang Administrasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan dan penetapan Surat Edaran Deputy Bidang Administrasi, antara lain: permohonan/pengusulan, penelaahan hukum/perumusan, hingga penetapan surat edaran.

04 Surat Perintah

04.01 Surat Perintah Sekretaris Kabinet

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan dan pengesahan surat perintah.

04.02 Surat Perintah Deputy Bidang Administrasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan dan pengesahan surat perintah.

05 Nota Kesepakatan/Memorandum of Understanding (MoU)/Kontrak/Perjanjian Kerja Sama

05.01 Dalam Negeri

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan kesepakatan/perjanjian kerja sama dengan pihak dalam negeri, antara lain: penyiapan, penelaahan, koordinasi, dan permohonan tanda tangan MoU/kontrak/perjanjian kerja sama dengan Kementerian/Lembaga/ BUMN/Pemda.

05.02 Luar Negeri

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan kesepakatan/perjanjian kerja sama dengan pihak luar negeri, antara lain: penyiapan, penelaahan, koordinasi, dan permohonan tanda tangan MoU/kontrak/perjanjian kerja sama dengan Pemerintah/Negara Sahabat/Lembaga Pendidikan.



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

06 Bantuan/Konsultasi Bantuan/Konsultasi Hukum/Advokasi

06.01 Pidana

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan bantuan/konsultasi hukum/advokasi bidang pidana, antara lain: hasil telaah, hasil konsultasi, dan laporan.

06.02 Perdata

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan bantuan/konsultasi hukum/advokasi bidang perdata, antara lain: hasil telaah, hasil konsultasi, dan laporan.

06.03 Tata Usaha Negara

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan bantuan/konsultasi hukum/advokasi bidang tata usaha negara, antara lain: hasil telaah, hasil konsultasi, dan laporan.

06.04 Agama

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan bantuan/konsultasi hukum/advokasi bidang agama (misal: perceraian), antara lain: hasil telaah, hasil konsultasi, dan laporan.

07 Penyebarluasan ke Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyebarluasan ke JDIH.

OT. ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

01 Organisasi/Kelembagaan

01.01 Penyusunan dan Pengembangan Organisasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan dan pengembangan organisasi, antara lain dokumen kajian.

01.02 Evaluasi Organisasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan evaluasi organisasi, antara lain: dokumen evaluasi.

02 Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan

02.01 Analisis Jabatan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan analisis jabatan, antara lain: dokumen pembahasan/analisis dan dokumen analisis jabatan.



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- 02.02 Analisis Beban Kerja
Naskah-naskah yang berkaitan dengan analisis beban kerja, antara lain: dokumen pembahasan/analisis dan dokumen analisis beban kerja.
- 02.03 Evaluasi Jabatan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan evaluasi jabatan, antara lain: dokumen pembahasan/analisis dan dokumen evaluasi jabatan.

03 Ketatalaksanaan

- 03.01 Proses Bisnis
Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen kajian dan pengembangan serta penetapan dokumen proses bisnis.
- 03.02 Standar Operasional Prosedur (SOP)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen kajian dan pengembangan serta penetapan dokumen SOP.
- 03.03 Standar Pelayanan (SP)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen kajian dan pengembangan serta penetapan dokumen SP.
- 03.04 Evaluasi Peraturan Internal
Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen telaah/kajian peraturan internal.

RB. REFORMASI BIROKRASI

01 Perencanaan Reformasi Birokrasi

- 01.01 Penyusunan/Penetapan *Road Map*
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan/penetapan *road map*, antara lain: proses penyusunan rancangan (usulan unit kerja, pembahasan, rancangan), penetapan *road map*, dan pelaporan.
- 01.02 Penyusunan/Penetapan *Work Plan*
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan/penetapan *work plan*, antara lain: proses penyusunan rancangan (usulan unit kerja, pembahasan, rancangan), penetapan *work plan*, dan pelaporan.



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

02 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

02.01 Penyusunan/Penetapan *Quick Wins*

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan/penetapan *quick wins*, antara lain: proses penyusunan rancangan (usulan unit kerja, pembahasan, rancangan), penetapan *quick wins*, dan pelaporan.

02.02 Penyusunan/Penetapan Manajemen Risiko

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan/penetapan manajemen resiko, antara lain: proses penyusunan rancangan (usulan unit kerja, pembahasan, rancangan), penetapan manajemen resiko, dan pelaporan.

02.03 Manajemen Perubahan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan/penetapan manajemen perubahan, antara lain: proses penyusunan rancangan (usulan unit kerja, pembahasan, rancangan), penetapan manajemen perubahan, dan pelaporan.

03 Evaluasi Reformasi Birokrasi

03.01 Data Dukung Lembar Kerja Evaluasi (LKE)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan data dukung LKE, antara lain: reformasi birokrasi, pelayanan publik, zona integritas (WBK/WBBM), dan laporan.

03.02 Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan evaluasi RB internal/mandiri dan eksternal pada 8 area perubahan dan *quick wins*, antara lain: dokumen persiapan, pembahasan, penyusunan lembar kerja/data dukung dari unit kerja, sosialisasi pelaksanaan, dan hasil penilaian.

03.03 Pelaksanaan Evaluasi Pelayanan Publik

Naskah-naskah yang berkaitan dengan evaluasi RB internal/mandiri dan eksternal pada pelayanan publik antara lain: dokumen persiapan, pembahasan, penyusunan lembar kerja/data dukung, sosialisasi pelaksanaan, dan hasil penilaian.



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- 03.04 Pelaksanaan Evaluasi Zona Integritas (WBK/WBBM)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan evaluasi RB internal/mandiri dan eksternal zona integritas (WBK/WBBM), antara lain: dokumen persiapan, pembahasan, penyusunan lembar kerja/data dukung, sosialisasi pelaksanaan, dan hasil penilaian.

AK. AKUNTABILITAS KINERJA

01 Penetapan Kinerja

- 01.01 Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen penyusunan IKU, antara lain: dokumen pembahasan, rancangan awal dan akhir, hingga penetapan.
- 01.02 Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen penyusunan PK, antara lain: dokumen pembahasan, rancangan awal dan akhir, hingga penetapan PK Pejabat Eselon I dan Pejabat lainnya.
- 01.03 Penyusunan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen penyusunan RAPK, antara lain: dokumen pembahasan, rancangan awal dan akhir, hingga penetapan.

02 Penyusunan Laporan

- 02.01 Penyusunan Kajian Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja
Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen kajian pengembangan sistem manajemen kinerja.
- 02.02 Penyusunan Laporan Kinerja
Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen laporan kinerja semester dan tahunan Sekretariat Kabinet dan laporan kinerja Eselon I dan II.

03 Penyusunan dan Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Pejabat dan Pegawai

- 03.01 Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Pejabat dan Pegawai
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan SKP, antara lain: dokumen rencana SKP, rewiu rencana SKP, penetapan SKP, perubahan SKP, dan rencana aksi/inisiatif strategis.



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- 03.02 Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Pejabat dan Pegawai Naskah-naskah yang berkaitan dengan penilaian SKP, antara lain: dokumen pendokumentasian kinerja, pengukuran terhadap rencana aksi/inisiatif strategis, hasil pengukuran kinerja, penilaian (SKP dan perilaku kerja), dan laporan dokumen penilaian kinerja.

KP. KEPEGAWAIAN

01 Formasi Pegawai

- 01.01 Usulan dari Unit Kerja
Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen usulan dari unit kerja.
- 01.02 Usulan Permintaan Formasi kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen usulan permintaan formasi kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- 01.03 Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- 01.04 Penetapan Formasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen penetapan formasi.

02 Pengadaan Pegawai

- 02.01 Penerimaan Pegawai
Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen proses penerimaan pegawai, antara lain: pengumuman, seleksi administrasi, pemanggilan peserta tes, pelaksanaan ujian tertulis, keputusan hasil ujian, dan wawancara.
- 02.02 Penetapan Pengumuman Hasil Seleksi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen penetapan pengumuman hasil seleksi CPNS.
- 02.03 Berkas Lamaran yang Tidak Diterima
Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen lamaran yang tidak diterima.
- 02.04 Nota Usul dan Kelengkapan Penetapan NIP
Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen nota usul dan kelengkapan penetapan NIP.



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- 02.05 Nota Usulan Pengangkatan CPNS menjadi PNS Lebih dari 2 Tahun
Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen nota usulan pengangkatan CPNS menjadi PNS lebih dari 2 tahun.
- 02.06 Surat Keputusan CPNS/PNS Kolektif
Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen Surat Keputusan CPNS/PNS Kolektif.
- 02.07 Pelaksanaan Seleksi JPT Madya dan JPT Pratama
Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen pelaksanaan seleksi JPT Madya dan JPT Pratama.
- 02.08 Pengadaan Pegawai Tidak Tetap
Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen proses penerimaan pegawai tidak tetap, antara lain: lamaran, Surat Perintah, Perjanjian Kerja.

03 Mutasi Pegawai

- 03.01 Peta Jabatan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan rumpun jabatan dan nama-nama jabatan dalam struktur organisasi.
- 03.02 Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi Antar Perwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara, dan Mutasi Antar Unit
Naskah-naskah yang berkaitan dengan alih status, pindah instansi, pindah wilayah kerja, diperbantukan, dipekerjakan, penugasan sementara, mutasi antar perwakilan, mutasi ke dan dari perwakilan, pemindahan sementara, dan mutasi antar unit, antara lain: berkas proses, nota, dan SK.
- 03.03 Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN
- 03.04 Mutasi Keluarga
Naskah-naskah yang berkaitan dengan mutasi keluarga, antara lain: Surat Izin Pernikahan/Perceraian, Surat



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Penolakan Izin Pernikahan/Perceraian, Surat Nikah/Cerai, Akta Kelahiran Anak, dan Surat Keterangan Meninggal Dunia.

- 03.05 Usul Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan usul kenaikan pangkat/golongan/jabatan, antara lain: Berkas Proses, Nota dan SK.
- 03.06 Usul Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Struktural/Fungsional
Naskah-naskah yang berkaitan dengan usul pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural/fungsional, antara lain: Berkas Proses, Nota dan SK.
- 03.07 Usul Penetapan Perubahan Data Dasar/Status/Kedudukan Hukum Pegawai
Naskah-naskah yang berkaitan dengan usul penetapan perubahan data dasar/status/kedudukan hukum pegawai, antara lain: Berkas Proses, Nota dan SK.
- 03.08 Peninjauan Masa Kerja
Naskah-naskah yang berkaitan dengan peninjauan masa kerja, antara lain: Berkas Proses, Nota dan SK.
- 03.09 Dokumen Baperjakat
Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen baperjakat.
- 03.10 Dokumen Pelantikan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen pelantikan.
- 03.11 Surat Keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Surat Keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai.
- 03.12 Penunjukkan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penunjukkan pelaksana harian dan pelaksana tugas, antara lain: surat keputusan dan surat perintah.

04 Pengangkatan dan Pemberhentian di Lingkungan Staf Khusus Presiden/Staf Khusus Wakil Presiden/Utusan Khusus Presiden

- 04.01 Dokumen Wawancara Calon Asisten dan Pembantu Asisten
Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses wawancara calon asisten dan pembantu asisten, antara lain: Memorandum Permohonan Pengangkatan Calon Asisten dan



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Pembantu Asisten, Berkas proses pelaksanaan wawancara, dan Laporan Hasil Wawancara Calon Asisten dan Pembantu Asisten.

04.02 Surat Keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian Asisten dan Pembantu Asisten

Naskah-naskah berkaitan dengan proses penetapan keputusan pengangkatan dan pemberhentian Asisten dan Pembantu Asisten, antara lain: Surat Keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian Asisten dan Pembantu Asisten, Otentifikasi Surat Keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian Asisten dan Pembantu Asisten.

05 Administrasi Pegawai

05.01 Surat Perintah Dinas/Surat Tugas

Naskah-naskah yang berkaitan dengan surat tugas dalam rangka melaksanakan penugasan.

05.02 Cuti

Naskah-naskah berkaitan dengan cuti pegawai, antara lain: cuti besar, cuti karena sakit, cuti melahirkan, cuti di luar tanggungan negara, cuti alasan penting, dan cuti tahunan.

05.03 Dokumentasi Identitas Pegawai

Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumentasi pegawai, antara lain: Usul Penetapan Kartu pegawai/KPE/Kartu Istri, Kartu Suami, Keanggotaan Organisasi, Profesi/Kedinasan, Laporan Pajak Penghasilan Pribadi, dan Keterangan Penerimaan Pembayaran Pegawai.

05.04 Berkas Informasi Kepegawaian

Naskah-naskah yang berkaitan dengan data dan informasi pegawai, antara lain: nama pegawai, pangkat, golongan, jabatan, dan TMT pangkat hingga TMT pensiun.

05.05 Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

06 Kesejahteraan Pegawai

- 06.01 Layanan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai
Naskah-naskah yang berkaitan dengan layanan Kesehatan pegawai.
- 06.02 Layanan Asuransi Pegawai
Naskah-naskah yang berkaitan dengan layanan asuransi pegawai.
- 06.03 Layanan Tabungan Perumahan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan layanan tabungan perumahan.
- 06.04 Layanan Bantuan Sosial
Naskah-naskah yang berkaitan dengan layanan bantuan sosial.
- 06.05 Layanan Olahraga dan Rekreasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan layanan olahraga dan rekreasi.
- 06.06 Layanan Pakaian Dinas
Naskah-naskah yang berkaitan dengan layanan pakaian dinas.
- 06.07 Pengurusan Jenazah
Naskah-naskah yang berkaitan dengan layanan pengurusan jenazah pegawai.
- 06.08 Kenaikan Gaji Berkala
Naskah-naskah yang berkaitan dengan layanan kenaikan gaji berkala.

07 Pemberhentian Pegawai Tanpa Hak Pensiun

Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen pemberhentian pegawai tanpa hak pensiun.

08 Perselisihan/Sengketa Kepegawaian

Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen perselisihan/sengketa kepegawaian.



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

**09 Usul Pemberhentian dan Penetapan Pensiun Pegawai/Jandanya/
Dudanya dan Pegawai Negeri Sipil yang Meninggal Dunia.**

Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen usul pemberhentian dan penetapan pensiun pegawai/jandanya/dudanya dan pegawai negeri sipil yang meninggal dunia.

10 Pembinaan Pegawai

- 10.01 Dokumen Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen permohonan/pengusulan, penetapan, dan penilaian SKP.
- 10.02 Daftar Usul Penetapan Angka Kredit
Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen daftar usul penetapan angka kredit.
- 10.03 Penetapan Angka Kredit
Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen penetapan angka kredit.
- 10.04 Disiplin Pegawai
Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen disiplin pegawai, antara lain: daftar hadir dan rekapitulasi daftar hadir.
- 10.05 Pembinaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen perencanaan, pelaksanaan, survei kepuasan, laporan monitoring dan evaluasi, dan data pembinaan pegawai negeri sipil.
- 10.06 Pemeriksaan dan Investigasi Pegawai Negeri Sipil
Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen pemeriksaan dan investigasi pegawai negeri sipil.
- 10.07 Pembinaan Non Pegawai Negeri Sipil
Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen perencanaan, pelaksanaan, survei kepuasan, laporan monitoring dan evaluasi, dan data pembinaan non pegawai negeri sipil.



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- 10.08 Pemeriksaan dan Investigasi Non Pegawai Negeri Sipil
Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen pemeriksaan dan investigasi non pegawai negeri sipil.
- 10.09 Administrasi Pembinaan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen perlindungan pegawai negeri sipil, data konseling pegawai, pengaduan pelanggaran, penghargaan tanda jasa/kehormatan, dan izin perjalanan luar negeri.

11 Penyelesaian Pengelolaan Keberatan Pegawai

Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen penyelesaian pengelolaan keberatan pegawai.

12 Pengembangan Pegawai

- 12.01 Pola Karir
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pola karir, antara lain: peta jabatan dan analisis jabatan.
- 12.02 Peta Bakat (*Talent Map*)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan peta bakat (*talent map*), antara lain: hasil uji kompetensi, dokumen *talent pool*, dan hasil *coaching* dan *counseling*.
- 12.03 Analisis Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan (*Training Needs Analysis*).
Naskah-naskah yang berkaitan dengan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan, antara lain: hasil uji kompetensi, program pengembangan individu, dan usulan kebutuhan diklat unit kerja.
- 12.04 Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan perencanaan Pendidikan dan pelatihan (struktural, fungsional, dan teknis), antara lain: kalender diklat.
- 12.05 Penyelenggaraan Pendidikan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dari awal sampai dengan akhir proses



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

penyelenggaraan pendidikan, antara lain: Surat Tugas/Surat Keputusan/Surat Izin/Surat Keterangan, dokumen persiapan pendidikan, dan laporan hasil pendidikan.

12.06 Penyelenggaraan Pelatihan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelatihan dari awal sampai dengan akhir proses penyelenggaraan pelatihan, antara lain dokumen persetujuan penyelenggaraan, Surat Perintah, laporan penyelenggaraan, dan sertifikat.

12.07 Laporan Monitoring dan Evaluasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan monitoring dan evaluasi, antara lain laporan kuartal dan tahunan.

13 Administrasi Magang

13.01 Magang

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan magang.

13.02 Penelitian

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan penelitian.

14 Berkas Perseorangan

14.01 Berkas Perseorangan Pegawai Negeri Sipil

Naskah-naskah yang berkaitan dengan berkas perseorangan PNS, antara lain: berkas lamaran yang diterima, nota penetapan NIP dan kelengkapannya, nota persetujuan/pertimbangan Kepala BKN, surat keputusan pengangkatan CPNS, hasil pengujian kesehatan, surat keputusan pengangkatan PNS, surat keputusan peninjauan masa kerja, surat keputusan kenaikan pangkat, surat pernyataan melaksanakan tugas/menduduki jabatan/surat pernyataan pelantikan, surat keputusan pengangkatan dalam jabatan atau pemberhentian dari jabatan struktural/fungsional, surat keputusan perpindahan wilayah



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

kerja, surat keputusan perpindahan antar instansi, surat keputusan cuti di luar tanggungan negara, berita acara pemeriksaan, surat keputusan hukuman jabatan/hukuman disiplin PNS, surat keputusan perbantuan/dipekerjakan di luar instansi induk, surat keputusan penarikan kembali dari perbantuan/dipekerjakan, surat keputusan pemberian uang tunggu, surat keputusan pembebasan dari jabatan organik karena diangkat sebagai Pejabat Negara, surat keputusan pengalihan PNS, surat keputusan pemberhentian sebagai PNS, surat keputusan pemberhentian sementara, surat keterangan pernyataan hilang, surat keterangan kembalinya pegawai negeri sipil yang dinyatakan hilang, surat keputusan penggantian nama, surat perbaikan tanggal tahun kelahiran, akta nikah/cerai, akta kelahiran, isian formulir PUPNS, berita acara pengambilan sumpah/janji PNS dan jabatan, surat permohonan menjadi anggota Partai Politik, surat keterangan mutasi keluarga, surat keterangan meninggal dunia/hilang, surat keterangan peningkatan pendidikan, penetapan angka kredit jabatan fungsional, surat keterangan hasil penelitian khusus, surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala, surat tugas/izin belajar dalam/luar negeri, surat izin berpergian ke luar negeri, kartu pendaftaran ulang (kardaf) PNS, ijazah/sertifikat, surat keputusan penempatan/penarikan pegawai, surat keputusan pengangkatan pada jabatan di luar instansi induk, surat pertimbangan status PNS, surat keputusan pengaktifan kembali sebagai PNS, surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan organik karena dicalonkan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah, dan surat keputusan pensiun.

14.02 Berkas Perseorangan Pegawai Tidak Tetap (PTT)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan berkas perseorangan PTT, antara lain: berkas lamaran yang diterima, daftar riwayat hidup, ijazah/sertifikat, surat perjanjian kerja, kartu keluarga, KTP, dan NPWP.



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

- 22 -

- 14.03 Berkas Perseorangan Sekretaris Kabinet
Naskah-naskah yang berkaitan dengan berkas perseorangan Sekretaris Kabinet, antara lain: DRH, berkas pengangkatan, dan daftar keluarga.
- 14.04 Berkas Perseorangan Pejabat Lainnya (Asisten dan Pembantu Asisten Utusan khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, Staf Khusus Wakil Presiden, dan Staf Khusus Sekretaris Kabinet)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan berkas perseorangan Asisten dan Pembantu Asisten Utusan khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, Staf Khusus Wakil Presiden, dan Staf Khusus Sekretaris Kabinet.

HM. HUBUNGAN KEMASYARAKATAN

01 Hubungan Kemasyarakatan

- 01.01 Peliputan Kegiatan Dinas Pimpinan, Acara Kedinasan dan Peristiwa-Peristiwa dalam Berbagai Media Kegiatan yang Diselenggarakan oleh Sekretariat Kabinet: Foto/Rekaman/Video/Transkrip/Multimedia
Arsip-arsip yang berkaitan dengan peliputan kegiatan dinas pimpinan, antara lain: kegiatan sidang kabinet, kegiatan Presiden, kegiatan Sekretaris Kabinet, dan kegiatan Sekretariat Kabinet (Kedeputian).
- 01.02 Pengumpulan, Pengolahan, dan Penyajian Informasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian informasi, antara lain: brosur/poster dan pengumuman/pemberitaan dalam bentuk digital (dalam dan luar Negeri).
- 01.03 Koordinasi Kehumasan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi kehumasan (Bakohumas/Perhumas).



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- 01.04 Pameran/Sayembara/Lomba, Festival, Pembuatan Spanduk dan Iklan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen pameran/sayembara/lomba, dokumen festival, dan dokumen pembuatan spanduk/*banner*.
- 01.05 Sambung Rasa
Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen ucapan terima kasih, ucapan selamat, ucapan bela sungkawa, ucapan ulang tahun, dan permohonan maaf.

02 Keprotokolan

- 02.01 Penyelenggaraan Keprotokolan Sekretaris Kabinet dan/atau Pengoordinasian Keprotokolan Kegiatan yang Diselenggarakan oleh Sekretariat Kabinet
Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen penyelenggaraan acara kedinasan (upacara pelantikan, peresmian, dan acara peringatan hari-hari besar), buku tamu, agenda kegiatan, kunjungan dinas Sekretaris Kabinet dalam dan luar negeri, penerimaan kunjungan tamu/delegasi/masyarakat, dan daftar nama/alamat kantor/pejabat.

03 Hubungan antar Lembaga Negara dan Badan Pemerintah/Instansi

- 03.01 Pelaksanaan Koordinasi Antar Kementerian/Lembaga dalam Rangka Mendukung Acara, Rapat, atau Pertemuan yang Dipimpin dan/atau dihadiri oleh Sekretaris Kabinet
Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen hubungan antar lembaga pemerintah, dan dokumen hubungan antar mitra kerja Komisi II DPR dalam rangka rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan pendampingan kunjungan kerja.

04 Pengelolaan Media, Pemantauan, dan Evaluasi Media Arus Utama dan Media Sosial

- 04.01 Pengelolaan Media (Netizen/Komunitas Digital)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengelolaan isu dan rekomendasi.



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

04.02 Monitoring dan Evaluasi Media Arus Utama dan Media Sosial
Naskah-naskah yang berkaitan dengan monitoring dan evaluasi terkait media arus utama dan media sosial.

PB. PENGADAAN BARANG DAN JASA

01 Perencanaan dan Pengoordinasian

01.01 Rencana Umum Pengadaan (RUP)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen usulan kebutuhan pengadaan, persetujuan RUP, kaji ulang RUP, persetujuan kaji ulang RUP.

01.02 Tender/Seleksi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen rencana pemilihan penyedia, dokumen penawaran, dokumen pemilihan, dokumen kontrak, dan dokumen serah terima barang/jasa.

01.03 Penunjukkan Langsung/*E-catalogue*

Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen rencana pemilihan penyedia, dokumen penawaran, dokumen pemilihan, dokumen kontrak, dan dokumen serah terima barang/jasa.

01.04 Pengadaan Langsung

Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen rencana pemilihan penyedia, dokumen penawaran, dokumen pemilihan, dokumen kontrak, dan dokumen serah terima barang/jasa.

02 Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan

02.01 Pelaporan Pengadaan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penetapan Pengelola/Tim Pengadaan, laporan monitoring dan evaluasi RUP, laporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa, dan data rekanan.



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

PP. PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)

01 Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen pendukung RKBMN usulan RKBMN pengadaan, Dokumen Pendukung RKBMN untuk Pemeliharaan, dan Persetujuan RKBMN untuk Pengadaan dan RKBMN untuk Pemeliharaan.

02 Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Negara

02.01 Dokumen Penetapan Status Penggunaan BMN

Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen penetapan status penggunaan Barang Milik Negara.

02.02 Dokumen Penggunaan Sementara BMN

Naskah yang berkaitan dengan dokumen penggunaan sementara BMN.

02.03 Dokumen Perjanjian Pemanfaatan BMN oleh Pihak Lain

Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen pemanfaatan BMN oleh pihak lain.

03 Penyimpanan dan Pendistribusian Barang Milik Negara

03.01 Barang Persediaan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen sumber perolehan barang persediaan (BAST, Kuitansi, dan Faktur) dan dokumen pendistribusian barang (bon permintaan barang).

03.02 Barang Milik Negara berupa Peralatan dan Mesin

Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen sumber perolehan barang peralatan dan mesin (BAST, kuitansi, dan faktur) dan dokumen pendistribusian barang (tanda terima penyerahan Barang Milik Negara ke unit kerja).

03.03 Aset Tetap Lainnya

Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen sumber perolehan barang aset tetap lainnya (BAST, kuitansi, dan faktur) dan dokumen pendistribusian barang (tanda terima penyerahan BMN ke unit kerja).



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

04 Penatausahaan Barang Milik Negara

04.01 Persediaan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan berita acara rekonsiliasi data barang persediaan dan laporan barang persediaan.

04.02 Aset Tetap dan Aset Lainnya

Naskah-naskah yang berkaitan dengan berita acara rekonsiliasi data internal dan eksternal serta laporan barang pengguna/ kuasa pengguna (LBP/LBKP).

05 Inventarisasi Barang Milik Negara

05.01 Barang Persediaan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan berita acara opname fisik barang persediaan.

05.02 Aset Tetap

Naskah-naskah yang berkaitan dengan surat keputusan pembentukan tim, laporan hasil inventarisasi BMN, dan Daftar Barang Ruangan (DBR).

06 Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Negara

06.01 Dokumen Pemusnahan BMN

Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen pemusnahan BMN.

06.02 Dokumen Pemindahtanganan BMN yang Ditindak-lanjuti melalui Lelang BMN

Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen pemindahtanganan BMN yang ditindaklanjuti melalui lelang BMN.

06.03 Dokumen Pemindahtanganan BMN yang Ditindaklanjuti Selain melalui Lelang BMN.

Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen pemindahtanganan BMN yang ditindaklanjuti selain melalui lelang BMN.



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

06.04 Surat Keputusan Penghapusan BMN
Naskah-naskah yang berkaitan dengan surat keputusan penghapusan BMN.

07 Dokumen Bukti Kepemilikan Aset

07.01 Bukti Kepemilikan Aset (Kendaraan)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan bukti kepemilikan aset (kendaraan).

08 Pengamanan, Pengawasan, dan Pengendalian

08.01 Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara
Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara.

PJ. PERLENGKAPAN DAN JAMUAN

01 Layanan Perlengkapan (Rapat, Pertemuan, Sidang Kabinet, dan Kegiatan Lainnya)

01.01 Koordinasi Unit Terkait
Naskah-naskah yang berkaitan dengan permintaan ruang rapat.

01.02 Jadwal Rapat dan Kegiatan Lainnya
Naskah-naskah yang berkaitan dengan daftar pengguna ruang rapat.

01.03 Penyiapan Ruang Rapat dan Penyediaan Perangkat Pendukung
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan ruang rapat dan penyediaan perangkat pendukung.

01.04 Pengajuan/Pengusulan Pengadaan Kebutuhan Kerumahtanggaan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengajuan/pengusulan pengadaan kebutuhan kerumahtanggaan

02 Layanan Jamuan

02.01 Permintaan Jamuan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan permintaan jamuan.



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- 02.02 Penyediaan Jamuan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemesanan jamuan.
- 02.03 Penggunaan Jamuan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan daftar kehadiran rapat.

PS. PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR

01 Perawatan dan Perbaikan Barang dan Bangunan

- 01.01 Gedung, Ruang kerja, Ruang Rapat, Kamar kecil, dan lain-lain
Naskah-naskah yang berkaitan dengan rancangan dan denah, serta perbaikan, perawatan, dan penggantian Gedung, Ruang kerja, Ruang Rapat, Kamar kecil.
- 01.02 Tanaman hias, Pencucian Karpet, Pencucian Kursi dan Sofa, Pengharum Ruangan, Basmi Hama, dan *Pest Rodent Control*, dan lain-lain
Naskah-naskah yang berkaitan dengan perbaikan, perawatan, dan penggantian.
- 01.03 Panel Listrik, AC, Elevator, Diesel/genset, Alat Pemadam, dll.
Naskah-naskah yang berkaitan dengan perbaikan dan pemasangan.

02 Perawatan dan Perbaikan Alat Pengolah Data (APD)

- 02.01 Inventarisasi Alat Pengolah Data
Naskah-naskah yang berkaitan dengan daftar APD.
- 02.02 Penggantian *Sparepart*, *Mouse* dan *Keyboard*
Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan kerusakan Alat Pengolah Data.
- 02.03 Instalasi *Operating System*, *Ms. Office*, dan Anti Virus
Naskah-naskah yang berkaitan dengan *software original dan update*.

03 Perawatan dan Perbaikan Kendaraan

- 03.01 Layanan Operasional Kendaraan Dinas
Naskah-naskah yang berkaitan dengan daftar peminjaman kendaraan, daftar *service* berkala, dan daftar penggantian *sparepart*.



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

- 03.02 Administrasi Hak Pakai Kendaraan Dinas
Naskah-naskah yang berkaitan dengan daftar pengguna kendaraan operasional.
- 03.03 Administrasi Bahan Bakar Kendaraan Dinas
Naskah-naskah yang berkaitan dengan daftar Penerima Kupon BBM.
- 03.04 Administrasi Pengemudi Kendaraan Dinas
Naskah-naskah yang berkaitan dengan daftar nama pengemudi.

PW. PENGAWASAN

01 Rencana Pengawasan

- 01.01 Program Kerja Pengawasan Tahunan
Naskah-naskah berkaitan dengan kebijakan pengawasan dan rencana dan *timeline* pengawasan.

02 Pelaksanaan Pengawasan Internal

- 02.01 Audit Operasional
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan mengenai audit operasional (*mereview* hal yang berpotensi mempengaruhi opini BPK), antara lain: surat tugas, Kertas Kerja Pengawasan (KKP), dan laporan audit operasional.
- 02.02 Audit dengan Tujuan Tertentu
Naskah-naskah pelaksanaan pengawasan terkait audit tujuan tertentu (sesuai arahan pimpinan), antara lain: surat tugas, KKP, dan laporan terkait audit tujuan tertentu.
- 02.03 Reviu
Naskah-naskah terkait reviu, antara lain: Laporan hasil reviu atas laporan keuangan Sekretariat Kabinet semester 1, Laporan hasil reviu atas laporan keuangan Sekretariat Kabinet (*unaudited*), Laporan hasil *review* atas laporan kinerja Sekretariat Kabinet, dan Laporan hasil reviu atas rencana kerja dan anggaran Sekretariat Kabinet.
- 02.04 Evaluasi
Naskah-naskah terkait Laporan Hasil Evaluasi SAKIP unit kerja, Laporan Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

Implementasi SPIP, dan Laporan Tim Penilai Internal (TPI) PMPRB, antara lain surat tugas, dan Kertas Kerja Pengawasan (KKP).

02.05 Pemantauan

Naskah-naskah berkaitan dengan laporan hasil monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, monitoring hasil pengawasan rapat luar kantor, dan laporan monitoring penyelesaian kerugian Negara, antara lain surat tugas, KKP, dan laporan.

02.06 Asistensi, Fasilitasi, dan Pelatihan

Naskah-naskah berkaitan dengan asistensi, fasilitasi, pelatihan mandiri, antara lain surat tugas, KKP, notula/laporan pelatihan mandiri.

02.07 Kegiatan Pengawasan Lainnya

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan lainnya atas dasar permohonan unit kerja internal atau instansi lain, antara lain memo kepatuhan terkait LHKASN.

02.08 Dukungan Administrasi dan Teknis Kegiatan Pengawasan.

Naskah-naskah terkait Laporan Kinerja dan pencatatan Data Capaian Kinerja Bulanan Inspektorat, antara lain: surat pemberitahuan dan laporan.

TI. TEKNOLOGI INFORMASI

01 Perencanaan Pembangunan/Pengembangan Teknologi Informasi (TI)

01.01 Penyusunan/Penetapan Arsitektur dan *Road Map* Pembangunan/Pengembangan TI

Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen arsitektur dan *road map* pembangunan/pengembangan TI.

01.02 Reviu Arsitektur dan *Road Map*

Naskah-naskah yang berkaitan dengan reviu arsitektur dan *road map*.



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

02 Pembangunan/Pengembangan TI

02.01 Aplikasi Umum (Layanan Administrasi Pemerintah)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembangunan/pengadaan aplikasi umum, diantaranya aplikasi perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi, kearsipan (persuratan), kepegawaian, dan pengaduan pelayanan publik, antara lain: memorandum permohonan, KAK/Proses Bisnis, SRS, *MoU*/perjanjian kerja sama, laporan *Pentest*, laporan pengembangan SI, dan buku panduan.

02.02 Aplikasi Khusus Layanan Publik

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembangunan/pengembangan aplikasi khusus Sekretariat Kabinet, diantaranya e-kabinet, SITAP, e-JFP, dan SIPPERMEN, antara lain: memorandum permohonan, KAK/Proses Bisnis, SRS, laporan *Pentest*, laporan pengembangan SI, dan buku panduan.

02.03 Aplikasi Pendukung

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembangunan/pengembangan/pengadaan aplikasi yang tidak termasuk dalam aplikasi khusus maupun aplikasi umum, diantaranya Aplikasi *Video Conference*, SDL-Trados, Aplikasi Infografis/Videografis, dan *E-mail* dinas, antara lain: memorandum permohonan, KAK/Proses Bisnis, SRS, *MoU*/perjanjian kerja sama, laporan *Pentest*, laporan pengembangan Sistem Informasi (SI), dan buku panduan.

02.04 Situs Jaringan (*Website*) Sekretariat Kabinet

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengelolaan situs jaringan (*website*) Sekretariat Kabinet (pengembangan/pemeliharaan *website*), antara lain: memorandum permohonan, KAK/Proses Bisnis, SRS, *MoU*/perjanjian kerja sama, laporan *pentest*, laporan pengembangan Sistem Informasi (SI), dan buku panduan.



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

02.05 Infrastruktur dan Jaringan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pengembangan, antara lain: dokumen rencana kerja, anggaran, dan pelaksanaan pengembangan infrastruktur jaringan (antara lain KAK/Dokumen Pengadaan, *MoU*/perjanjian kerja sama, laporan pengembangan, *update* konfigurasi/catatan konfigurasi (dokumen *update*/migrasi).

03 Pembinaan dan Penerapan TI

03.01 Penyampaian *User Acceptance Test (UAT)*, Berita Acara Serah Terima (BAST) dan *Security Clearance*

Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen UAT, BAST, dan *Security Clearance*.

03.02 Sosialisasi Penerapan TI/Pendampingan/Bimbingan Teknis

Naskah-naskah yang berkaitan dengan sosialisasi penerapan TI/pendampingan/bimbingan teknis, antara lain: dokumen pengusulan/permohonan, memorandum, dan laporan kegiatan sosialisasi pendampingan/bimbingan teknis penerapan TI (aplikasi, informasi, dan infrastruktur).

03.03 Penerapan TI

Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen penerapan TI.

03.04 *Update* Perangkat dan Konfigurasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan *log update* dan catatan konfigurasi, serta dokumen *update*.

03.05 Pemeliharaan Infrastruktur dan Jaringan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemeliharaan infrastruktur, antara lain: dokumen permohonan perbaikan, laporan penggunaan *virtual private server (VPS)*, dan pengajuan perpanjangan lisensi.

03.06 Pengelolaan Data

Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen pengelolaan data, antara lain: *database*, Satu Data Indonesia, serta interoperabilitas data.



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

- 03.07 Pengelolaan Pelaksanaan *Backup* dan *Restore*
Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen *backup* dan *restore*, antara lain: *database*, aplikasi, dan infrastruktur.

04 Pemantauan dan Evaluasi Penerapan TI

- 04.01 Pemantauan Infrastruktur dan Jaringan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen monitoring/pemantauan jaringan antara lain permohonan perbaikan, laporan penggunaan VPS, hasil monitoring perangkat jaringan yang dijadikan data ataupun informasi dalam laporan monitor jaringan dan tindak lanjutnya.
- 04.02 Pemantauan Keamanan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen monitor keamanan TI.
- 04.03 Evaluasi Penerapan TI
Naskah-naskah yang berkaitan dengan evaluasi penerapan TI, antara lain: hasil pemantauan jaringan, hasil pemantauan keamanan, hasil survei, dan laporan survei.
- 04.04 Insiden Keamanan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen insiden keamanan TI.

YL. PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

01 Pengelolaan Penyebarluasan/Pelayanan Informasi

- 01.01 Pengumpulan, Pendokumentasian, dan Penyebarluasan/
Pengunggahan/Pelayanan Informasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan, pendokumentasian, dan penyebarluasan/
pengunggahan/pelayanan informasi kegiatan Kabinet, Sekretaris Kabinet, dan Sekretariat Kabinet melalui media arus utama (*website*) dan media sosial.
- 01.02 Pengklasifikasian Informasi Publik
Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen pengklasifikasian informasi publik, antara lain: informasi



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

secara berkala, informasi serta merta, informasi setiap saat, dan informasi yang dikecualikan.

01.03 Pengelolaan Keberatan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen pengelolaan keberatan.

01.04 Penyelesaian Sengketa

Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen penyelesaian sengketa.

02 Penanganan Pengaduan Masyarakat/Pelayanan Publik

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penanganan pengaduan masyarakat/pelayanan publik, antara lain: surat permohonan/aspirasi/pengaduan, dan dokumen pembahasan dan tanggapan atau pemenuhan/tindak lanjut permohonan.

03 Pelaporan Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaporan penyelenggaraan pelayanan publik, antara lain: dokumen pelaporan PPID dan dokumen laporan penanganan pengaduan masyarakat/pelayanan publik.

KA. KEARSIPAN

01 Administrasi Persuratan

01.01 Kartu Kendali

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kartu kendali.

01.02 Buku Agenda

Naskah-naskah yang berkaitan dengan buku agenda, antara lain: agenda penomoran, agenda pengiriman, dan agenda pendistribusian.

01.03 Formulir/Catatan Permintaan Layanan Informasi Persuratan

Naskah-Naskah yang berkaitan dengan formulir/catatan permintaan layanan informasi persuratan, antara lain: formulir permohonan data dan informasi serta penggandaan, formulir permohonan cap dinas/jabatan, dan formulir permohonan peminjaman cap dinas/jabatan.



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

- 01.04 Penanganan Tindak Lanjut Izin Penggunaan Logo yang Bertuliskan Sekretariat Kabinet
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan tindak lanjut izin penggunaan logo yang bertuliskan Sekretariat Kabinet, antara lain: dokumen pengajuan izin, tindak lanjut penggunaan logo.

02 Ketatausahaan Pimpinan

- 02.01 Persuratan Pimpinan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan persuratan pimpinan.
- 02.02 Memori Jabatan Pimpinan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan memori jabatan pimpinan, antara lain: bahan memori jabatan Sekretaris Kabinet dan memori serah terima jabatan Sekretaris Kabinet.

03 Penyimpanan dan Pemeliharaan Arsip

- 03.01 Penyimpanan Arsip
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyimpanan arsip, antara lain: daftar arsip (aktif dan inaktif), pelaksanaan penyimpanan, dan pelaporan.
- 03.02 Pemeliharaan Arsip
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemeliharaan arsip, antara lain: usulan pengadaan fumigasi dan pelaksanaannya, usulan pengadaan alat pengatur kelembaban udara (*humidifier*), dan lain-lain.
- 03.03 Alih Media
Naskah-naskah yang berkaitan dengan *file* digitalisasi arsip hasil alih media dan berita acara digitalisasi.

04 Persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA)

- 04.01 Persetujuan Arsip Nasional Republik Indonesia
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengusulan/permohonan penetapan Jadwal Retensi Arsip (JRA), antara lain: surat penyampaian/pengusulan ke ANRI, penetapan persetujuan dari Kepala ANRI, dan lampiran JRA.



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

05 Pembinaan Kearsipan

05.01 Sosialisasi Kearsipan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan memorandum izin prinsip kegiatan, undangan ke unit kerja, memorandum penyiapan tempat dan jamuan, pelaksanaan kegiatan, daftar hadir dan memorandum ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

05.02 Pengembangan Sumber Daya Manusia Kearsipan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyampaian ke Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana mengenai pengembangan sumber daya manusia kearsipan antara lain: pengusulan ke Biro SDMOT.

05.03 Bimbingan dan Penyuluhan Kearsipan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan antara lain: izin prinsip ke Deputy Bidang Administrasi terkait kegiatan (memorandum izin prinsip, undangan ke unit kerja, surat permohonan narasumber ke ANRI, dan memorandum ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)), memorandum tempat pelaksanaan, jamuan, dan *link zoom*, dan daftar hadir.

06 Layanan Penggunaan Arsip

Naskah-naskah yang berkaitan dengan layanan peminjaman arsip antara lain buku/formulir peminjaman dan penggunaan arsip.

07 Penyusutan Arsip

07.01 Pemandahan Arsip Inaktif

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemindahan arsip inaktif, antara lain: dokumen usulan unit kerja dan daftar arsip, memorandum dari Unit Kearsipan, dokumen penyeleksian arsip, berita acara, dan dokumen pelaksanaan pemindahan arsip.



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

07.02 Pemusnahan Arsip yang Tidak Bernilai Guna

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna, antara lain: dokumen usulan pemusnahan dan daftar arsip, pembentukan tim penilai, pembuatan daftar arsip musnah, penilaian oleh tim penilai arsip, persetujuan Kepala ANRI, penetapan arsip yang akan dimusnahkan, dan pelaksanaan pemusnahan arsip (berita acara dan daftar arsip yang dimusnahkan).

07.03 Penyerahan Arsip Statis

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyerahan arsip statis, antara lain: surat permohonan rekomendasi persetujuan penyerahan arsip ke ANRI, dokumen pelaksanaan serah terima arsip statis kepada ANRI, serta berita acara serah terima dan daftar arsip statis yang diserahkan.

08 Pengawasan Kearsipan

08.01 Pengawasan Kearsipan Internal

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengawasan kearsipan internal, antara lain: memorandum, penyampaian surat ke ANRI, materi bimtek pengawasan kearsipan, daftar tim pengawas kearsipan, Laporan Audit Kearsipan Internal Unit Pengolah, dan Laporan Audit Kearsipan Internal Konsolidasi.

08.02 Pengawasan Kearsipan Eksternal

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengawasan kearsipan eksternal, antara lain: memorandum, penyampaian surat ke ANRI, materi bimtek pengawasan kearsipan, daftar tim pengawas kearsipan, dan Risalah Hasil Audit Sementara (RHAS).



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

09 Penyusunan Sistem Kearsipan (Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, Pengelolaan Arsip Dinamis)

09.01 Dokumen Penyusunan Sistem Kearsipan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen penyusunan sistem kearsipan, antara lain: rancangan sistem, pembahasan rancangan sistem, dan rancangan final.

PT. PERPUSTAKAAN

01 Pengelolaan Bahan Perpustakaan

01.01 Inventarisasi Bahan Pustaka

Naskah-naskah yang berkaitan dengan daftar inventarisir bahan pustaka, antara lain: daftar bahan pustaka.

01.02 Klasifikasi dan Katalogisasi Bahan Pustaka

Naskah-naskah yang berkaitan dengan katalog bahan perpustakaan, antara lain: *database* sistem perpustakaan.

01.03 Pemeliharaan/Perawatan Bahan Pustaka

Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen administrasi pemeliharaan dan perawatan bahan Pustaka, antara lain: memorandum permintaan sarana pemeliharaan dan perawatan.

01.04 Penghapusan/Penyusutan Bahan Pustaka

Naskah-naskah yang berkaitan dengan berita acara penyusutan bahan pustaka.

02 Pelayanan Perpustakaan

02.01 Keanggotaan Perpustakaan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan daftar keanggotaan perpustakaan.

02.02 Peminjaman dan Pengembalian Bahan Pustaka

Naskah-naskah yang berkaitan dengan daftar peminjaman dan pengembalian bahan pustaka.



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

03 Pengembangan Perpustakaan

03.01 Pengembangan/Pengumpulan/Penyediaan Bahan Pustaka
Naskah-naskah yang berkaitan dengan usulan dari unit
kerja tentang buku/*e-book* yang dibutuhkan, daftar buku/
e-book, dan pengadaan buku/*e-book*.

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PRAMONO ANUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Administrasi,

